

LAPORAN HASIL AUDIT RUTIN

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Cabang Panjang

Tahun 2022

Distribusi Laporan Hasil Audit:

- ☐ Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok
- ☐ Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok c.q Komite Audit
- ☐ *Branch Manager* PTP Cabang Panjang
- ☐ Arsip

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok

Perihal : Laporan Hasil Audit Rutin pada PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Cabang Panjang Tahun 2022

Kami telah melakukan audit rutin pada PTP Cabang Panjang untuk periode 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Proses audit tersebut dilaksanakan dari tanggal 4 September sampai dengan tanggal 14 September 2022, dengan hasil audit sebagaimana kami sajikan pada laporan ini.

Tujuan audit, ruang lingkup audit dan prosedur audit yang telah dilakukan kami rangkum dalam Ringkasan Eksekutif dari laporan ini.

Seluruh hasil audit dan rekomendasi telah kami bahas dan disepakati oleh auditi dan *Person In Charge* (PIC) terkait.

Kami mengucapkan terima kasih kepada *Branch Manager* dan *Deputy Manager* PTP Cabang Panjang beserta staf atas kerja samanya selama pelaksanaan audit.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Edy Setyo Rahardjo

SM Pengawasan Internal & Hukum

	Hal
❑ Daftar Isi	3
❑ Ringkasan Eksekutif	5
❑ Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit	6
1. Implementasi Sistem Uper belum Diterapkan.....	6
2. Lama Penerbitan Pranota dari Kegiatan Selesai.....	7
3. Hasil Kerja Sama dengan PT Lintas Nusantara Prima belum Optimal.....	8
4. Penggunaan Bangunan Kantor oleh PT Intisentosa Alambahtera.....	9
5. Kerusakan GJC 02, <i>Forklift Diesel</i> 10 Ton, <i>Hopper</i> dan <i>Grab GJC</i>	10
6. Surat Izin Operator (SIO) yang Telah Berakhir Masa Berlakunya.....	10
7. Bagi Hasil Kerja Sama Pengoperasian <i>Hopper</i> dengan PT Guda Artha Kencana Perlu Ditingkatkan.....	11
8. Meningkatnya Biaya Perlengkapan PTP Cabang Panjang.....	12
9. Pelayanan Bongkar Muat Belum 24/7.....	13
10. Pemakaian Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL).....	14
11. Inkonsistensi Pencatatan Beban Pegawai pada Laporan Keuangan Agustus 2022 PTP Cabang Panjang.....	15
12. Kesalahan Pada Pencatatan <i>Revenue Sharing</i> atas Dermaga C1 & C2 antara PTP dengan IKT.....	16
13. Perbedaan Pencatatan dan Perhitungan <i>Revenue Sharing</i> PTP Cabang Panjang.....	17
14. Laporan Pemantauan Risiko PTP Cabang Panjang Belum Memadai.....	18
15. Belum Sterilnya Tempat Penyimpanan <i>Grab</i> di Area Dermaga.....	19
❑ Ringkasan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan	20
1. Aktiva Tetap belum Dilakukan Pembebanan Penyusutan.....	20
2. Kurangnya Perawatan pada Alat Bantu Bongkar Muat.....	21
3. Penempatan <i>Rampdoor</i> di Lapangan belum Dikenakan Kontribusi Penumpukan.....	21
4. SK GM tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang Telah Habis Masa Berlakunya.....	22
5. Pencatatan Biaya Tahun 2021 yang Dicatat di Tahun 2022.....	22
6. Pembuatan PO Berdasarkan Kegiatan Per Kapal.....	23

	Hal
❑ Lampiran-Lampiran	24
1. Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit	24
2. Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan	81
3. Definisi Istilah	86
4. <i>Copy</i> Surat Perintah Audit	87

Tujuan Audit

1. Memberikan penilaian atas penerapan prinsip-prinsip pokok pengendalian internal terhadap pengelolaan PTP Cabang Panjang yang mencakup pengelolaan aspek-aspek finansial, komersial, operasional dan legal/governance.
2. Memberikan penilaian atas pelaksanaan SOP perusahaan untuk meyakinkan bahwa SOP telah menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan SOP yang ada telah memadai.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan atas kebijakan pengelolaan PTP Cabang Panjang yang mencakup aspek Tata Kelola (Governance), Manajemen Risiko (Risk) dan Pengendalian Internal (Control).

Ringkasan Prosedur Audit yang Dilakukan

Audit kami laksanakan melalui prosedur berikut:

1. Melakukan reviu atas dokumen/administrasi perusahaan, melaksanakan observasi visual, melakukan wawancara/konfirmasi serta pemeriksaan fisik untuk menilai ketaatan terhadap peraturan perusahaan.
2. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap upaya yang dilakukan manajemen Cabang dalam pencapaian sasaran/target perusahaan.
3. Melakukan telaah atas aturan, pedoman dan SOP yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Cabang untuk dilakukan penyempurnaan.

Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup audit :

- Ruang lingkup audit adalah seluruh aktivitas pengelolaan PT PTP Cabang Panjang yang meliputi pengelolaan aspek-aspek komersial, operasional dan teknik, pengendalian kinerja, keuangan, GCG, SDM dan umum, pengadaan, dan sistem informasi/IT.

Periode yang diaudit :

- Periode yang diaudit adalah tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.

Opini Audit

Berdasarkan audit ini kami memberikan opini terhadap Pengelolaan pada PT PTP Cabang Panjang adalah :

2 – Some Improvement Needed (Diperlukan beberapa perbaikan)

Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

6

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
1.	<p><i>Implementasi Sistem Uper belum Diterapkan</i></p> <p>Sebagai tindak lanjut rekomendasi atas audit tahun 2021 atas temuan Saldo Uang untuk Dipertanggungkan (UPER) dan Uang Titipan (UTIP) di Neraca belum Menggambarkan Keadaan Sebenarnya, saat ini SIMBarang untuk penerapan Uper sudah tersedia namun belum diimplementasikan.</p> <p>Terdapat 3 Pengguna Jasa cara pembayaran pelunasan nota dengan dikenakan <i>Down Payment (DP)</i> dan sisa pembayaran dilunasi 14 hari. Pengenaan DP merupakan pembayaran sebagian di muka, tidak bisa disamakan dengan Uper dikarenakan pencatatan pembayaran DP dilakukan secara manual sampai saat perhitungan kompensasi (<i>off set</i>) dengan realisasi nantinya. Besaran perhitungan DP juga tidak melalui SIMBarang. Pembayaran DP tersebut dicatat di SIMKEU sebagai UPER atau UTIP.</p>	Mengimplementasikan sistem Uper melalui aplikasi SIMBarang untuk setiap pelayanan kegiatan bongkar muat	<p><i>Branch Manager Cabang Panjang</i></p> <p>30 November 2022</p>	2

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

7

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
2.	<p><i>Lama Penerbitan Pranota dari Kegiatan Selesai</i></p> <p>Berdasarkan laporan produksi pranota periode Januari - 8 September 2022 disampaikan sebagai berikut :</p> <p>a. Lamanya penerbitan pranota yang sesuai ketentuan (0 - 1 hari) secara kuantitas mencapai 58,31% atau sebanyak 1.894 pranota; sedangkan 41,69% atau 1.354 pranota penerbitannya lebih dari 2 (dua) hari;</p> <p>b. Lamanya penerbitan pranota yang sesuai ketentuan (0 - 1 hari) secara nominal mencapai 39,09% atau sebesar Rp28.788.233.870,00 sedangkan 60,91% atau Rp44.849.828.313,00 penerbitan pranota lebih dari 2 (dua) hari;</p> <p>c. Jenis layanan atas penerbitan pranota : OPP/OPT, JIB <i>Crane</i>, GLC, <i>Forklift</i>, Kontribusi Alat, Alat Mekanis, Alat Non Mekanis, Dermaga, Kebersihan, Penumpukan, <i>Share Handling</i> Terminal <i>Multipurpose</i>, <i>Share Handling</i> Terminal Curah Kering, Timbangan, Lain-Lain, dan Retribusi Kendaraan. Rata-rata lama penerbitan nota adalah 4,06 hari, paling lama adalah 116 hari pada penerbitan pranota dermaga, dan kebersihan.</p> <p>Lamanya penerbitan pranota sejak kegiatan selesai dilaksanakan dikarenakan menunggu kelengkapan dokumen pendukung yang harus dikonfirmasi ke Pengguna Jasa. Hal tersebut berakibat tertundanya pengakuan pendapatan dan penerimaan kas</p>	Melakukan sosialisasi ke Pengguna Jasa terkait batas waktu penerbitan pranota paling lambat 1x24 jam sejak kegiatan selesai dilaksanakan	<p><i>Branch Manager Cabang Panjang</i></p> <p>31 Oktober 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
3.	<p>Hasil Kerja Sama dengan PT Lintas Nusantara Prima belum Optimal</p> <p>Berdasarkan pengujian atas kerja sama tersebut diketahui kondisi antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PT LNP adalah mitra yang merupakan <i>cargo owner</i> sekaligus sebagai PBM yang melakukan <i>handling</i> bongkar muat atas <i>cargo</i> miliknya. b. Terdapat tagihan dari PT LNP yang belum dibayarkan oleh Cabang Panjang sebesar Rp632.768.755,00. Dan terdapat juga piutang PTP atas nota-nota yang sudah diterbitkan namun belum dibayar/dilunasi oleh PT LNP yaitu sebesar Rp2.017.636.288,00 dan diantaranya sebesar Rp955.218.473,00 telah melewati jangka waktu. c. Meskipun margin akhir PTP secara keseluruhan dari masing-masing kegiatan kapal memperoleh margin positif atau laba, namun untuk komponen <i>Stevedoring</i>, PTP memperoleh margin negatif/minus. d. Atas pekerjaan kebersihan yang dilakukan oleh pihak PT MAM, khususnya untuk kegiatan bongkar muat atas <i>cargo</i> PT LNP terjadi pemborosan sebesar Rp30.373.083,00, karena disisi lain Cabang Panjang telah memiliki juga kerja sama dengan PT KIS yang ruang lingkup pekerjaan kebersihannya meliputi Terminal Curah Kering dan Terminal <i>Multipurpose</i>. e. Pengujian atas isi berita-berita acara kesepakatan menunjukkan bahwa masih terdapat ketentuan-ketentuan yang seharusnya diatur, namun belum dimuat dalam berita-berita acara tersebut. Dan seharusnya kesepakatan/perikatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Berkoordinasi dengan Direktorat Komersial Kantor Pusat PTP dengan membuat opsi-opsi perhitungan pola kerja sama dengan Mitra agar Cabang Panjang dapat memperoleh margin laba yang lebih optimal; b. Melakukan penagihan kepada PT LNP untuk segera menyelesaikan kewajiban atas pelunasan piutang Perusahaan; c. Mereview kerja sama pekerjaan kebersihan dengan PT MAM untuk efisiensi biaya kebersihan; d. Melakukan negosiasi dengan Pihak PT LNP untuk menambahkan butir-butir kesepakatan yang lebih komprehensif dan dituangkan dalam bentuk perjanjian. 	<p>Branch Manager Cabang Panjang 10 November 2022</p>	2

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
4.	<p>Penggunaan Bangunan Kantor oleh PT Intisentosa Alambahtera</p> <p>Berdasarkan reviu atas butir-butir yang disepakati dalam Perjanjian Nomor: HK.55/30/9/3/PTP-21 & Nomor: 062B/Dir_IA/LPG/IX/2021 tanggal 30 September 2021 tentang kerja sama Pengelolaan Tanah HPL dan Fasilitas Penunjang di Pelabuhan Panjang diantaranya, pada Pasal 7 ayat (3) huruf i memuat ketentuan yang menyatakan Kewajiban Pihak Kedua (PT ISAB) membayar biaya penggunaan bangunan kantor yang digunakan Pihak Kedua apabila kewajiban Komponen Tanah ditangguhkan oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) Perjanjian ini.</p> <p>Adapun Pasal 5 ayat (8) dimaksud memuat ketentuan yang antara lain menyatakan bahwa selama Jangka Waktu Perjanjian, Pihak Kedua berhak menangguhkan kewajiban pembayaran Komponen Tanah sebesar Rp7.000,00/ton (tujuh ribu Rupiah per ton). dan oleh karenanya Pihak Kedua hanya berkewajiban membayar tarif <i>handling</i> sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian SLA, SLG dan Tarif, sampai dengan ditandatanganinya <i>addendum</i> perjanjian Induk mengenai Penyesuaian jangka waktu Perjanjian Induk dan Perjanjian ini menjadi 20 (dua puluh) tahun oleh Para Pihak sebagaimana juga diatur dalam pasal 6 ayat (2) Perjanjian ini.</p> <p>Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Cabang Panjang, sampai dengan saat ini kewajiban pembayaran Komponen Tanah sebesar Rp7.000/ton tersebut masih ditangguhkan oleh PT ISAB dan belum ada negosiasi dan/atau penagihan yang dilakukan atas penggunaan bangunan kantor oleh PT ISAB. Terkait dengan hal ini, Cabang Panjang akan melakukan pembicaraan/negosiasi dengan PT ISAB untuk menagihkan pembayaran penggunaan bangunan kantor tersebut.</p>	<p>Segera melaksanakan koordinasi/negosiasi dengan pihak PT ISAB dalam rangka pembayaran biaya penggunaan bangunan kantor yang digunakan PT ISAB, sehubungan dengan kewajiban Komponen Tanah yang ditangguhkan oleh PT ISAB.</p>	<p>Branch Manager Cabang Panjang 10 November 2022</p>	2

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

10

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
5.	<p>Kerusakan GJC 02, Forklift Diesel 10 Ton, Hopper dan Grab GJC</p> <p>Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa ada beberapa alat bongkar muat utama, alat pendukung dan alat bantu yang masuk dalam BASO namun mengalami kerusakan seperti GJC 02 mengalami kerusakan sejak tanggal 14 Agustus 2022, sampai sekarang masih dalam tahap pengecekan dan rekomendasi dari Tim JPPI area Panjang untuk dilakukan penggantian <i>Bearing Boom Rock</i> and <i>Balance</i> dan penggantian <i>Bearing Pinion</i>. Tim JPPI area Panjang masih berkoordinasi dengan JPPI Kantor Pusat terkait dengan waiting part GJC 02, berikutnya ada kerusakan <i>Forklift Diesel</i> 10 Ton sejak bulan Agustus 2021 dimana sekarang masih dalam tahap proses administrasi pengajuan <i>retrofit body</i>, <i>electrical system</i> dan <i>hydraulic system</i>. Berikutnya ada alat bantu berupa <i>Hopper</i> no 02, 03 dan 04 banyak yang keropos sehingga sudah tidak digunakan sejak tahun 2019. Untuk Grab GJC no 01 kondisinya bocor sedangkan <i>Grab</i> GJC no 04 rusak dan sudah tidak dioperasikan sejak tahun 2020.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Berkoordinasi dengan PT JPPI area Panjang dalam rangka pembuatan berita acara <i>waiting part</i> untuk kerusakan alat GJC 02 b. Berkoordinasi dengan Pelindo Regional 2 Panjang untuk percepatan proses <i>Retrofit Body Forklit Diesel</i> 10 Ton c. Membuat evaluasi dan berkoordinasi dengan Direktorat Komersial Kantor Pusat dan/atau Pelindo Regional 2 Panjang terkait dengan alat-alat yang sudah lama tidak dioperasikan yaitu <i>Hopper</i> 02, 03 dan 04, untuk diusulkan dikeluarkan dari lampiran aset pada BASO 	<p>Branch Manager Cabang Panjang</p> <p>31 Oktober 2022</p>	1
6.	<p>Surat Ijin Operator (SIO) yang Telah Habis Masa Berlakunya</p> <p>Berdasarkan reuiu data operator alat bongkar muat utama dan alat pendukung bongkar muat terdapat 2 (dua) personil yang masa berlaku SIO-nya telah berakhir sejak tanggal 31 Maret 2022 yaitu sdr Ulil Azmi dan sdr Sukamto (TNO).</p>	<p>Segera mengurus/memproses pembuatan perpanjangan SIO bagi operator yang berstatus TNO yang telah berakhir masa berlaku SIO-nya</p>	<p>Branch Manager Cabang Panjang</p> <p>31 Oktober 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
7.	<p>Bagi Hasil Kerja Sama Pengoperasian Hopper dengan PT Guda Artha Kencana Perlu Ditingkatkan</p> <p>Berdasarkan data produksi periode bulan November 2021 sampai dengan Agustus 2022 diketahui data <i>sharing</i> produksi bongkar <i>Soyabean/Soyabean mill</i> selama 10 bulan berjalan sejak mulai perjanjian sudah menangani sebanyak 394.861 (tiga ratus Sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu Ton) dengan pendapatan Rp1.184.583.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan bagi hasil untuk PT PTP sebesar Rp296.145.750,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk PT Guda Artha Kencana mendapat Rp888.437.250,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Dari perolehan pendapatan tersebut terlihat perbedaan yang cukup tinggi antara PT PTP dengan PT Guda Artha Kencana.</p> <p>Jika dibandingkan dengan Cabang Banten dengan metode sewa <i>Hopper</i> murni sebesar Rp2.500/ton namun sudah termasuk di dalamnya SDM, kebersihan, mobilisasi dan demobilisasi ditanggung oleh pemilik <i>Hopper</i>, sedangkan tarif yang disewakan ke pengguna jasa sebesar Rp3.500/ton untuk yang elektrik dan Rp3.000/ton untuk yang non elektrik.</p>	Melakukan negosiasi ulang untuk menaikkan persentase perbandingan bagi hasil dengan PT Guda Artha Kencana	<p>Branch Manager Cabang Panjang</p> <p>31 Oktober 2022</p>	1

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
8.	<p><i>Meningkatnya Biaya Perlengkapan PTP Cabang Panjang</i></p> <p>Dari data realisasi biaya perlengkapan Januari sampai dengan Agustus tahun 2022 dibandingkan dengan RKAP sebesar Rp1.478.419.528,00 dan <i>Year on year</i> pada periode yang sama tahun sebelumnya mengalami selisih sebesar Rp228.535.138,00 dimana pada realisasi sampai dengan Agustus 2021 sebesar Rp1.652.964.820,00 dan realisasi s.d Agustus 2022 sebesar Rp1.478.419.528,00.</p> <p>Dari informasi yang diterima sampai dengan masa audit belum pernah dibuatkan daftar pembelian/pengadaan barang dan jasa sehingga tidak dapat dijelaskan rincian biaya peralatan. Admisnistator hanya menyimpan bukti kwitansi dan memo permintaan yang kurang lengkap. Hal ini menyebabkan tidak adanya evaluasi dan monitoring pengadaan/pembelian untuk keperluan pelayanan operasi khususnya untuk pembelian/pengadaan maupun perbaikan alat-alat bantu bongkar muat.</p> <p>Petugas yang bertanggung jawab terhadap peralatan non mekanis juga tidak mencatat keluar-masuknya peralatan sehingga tidak adanya control terhadap peralatannya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Membuat daftar pembelanjaan barang dan jasa untuk perlengkapan/bahan peralatan yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan monitoring serta pengendalian biaya. Membuat prosedur pergerakan peralatan non mekanis sehingga dapat mengontrol dan mengevaluasi perlengkapan khususnya peralatan bongkar muat non mekanis Memberikan sosialisasi kepada tenaga operasional untuk memperhatikan penggunaan peralatan non mekanis agar tidak cepat rusak. 	<p><i>Branch Manager Cabang Panjang</i></p> <p>10 November 2022</p>	2

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
9.	<p>Pelayanan Bongkar Muat Belum 24/7</p> <p>Berdasarkan data <i>idle time</i> pada <i>Survival Kit</i> kinerja bongkar muat (B/M) yang terjadi di bulan Juli dan Agustus 2022 sebagai berikut :</p> <p>a. Dari sekian faktor penyebab <i>idle time</i> hanya 3 faktor penyebab yang paling dominan yaitu cuaca (hujan), tunggu truk (<i>waiting truck</i>) dan stop kegiatan (<i>knocking off</i>).</p> <p>b. Faktor paling tinggi adalah <i>stop</i> kegiatan (<i>knocking off</i>) selama 545,64 Jam (83%) dari total <i>idle time</i> yang apabila dikonversi sama dengan 22 hari 17 jam. Sedangkan untuk <i>idle time</i> yang disebabkan oleh cuaca hanya selama 75.71 jam (11%) atau selama 3 hari 3 jam dan <i>waiting Truck</i> selama 38.64 jam (5.85) atau 1 hari 14 jam.</p> <p>Tingginya <i>idle time</i> pasti menyebabkan ET (<i>effective time</i>) berkurang dan kinerja ET/BT (<i>effective time per berthing time</i>) juga akan berkurang prosentasenya. Selanjutnya BOR (<i>Berth Occupancy Ratio</i>) juga berkurang sehingga mengakibatkan <i>dwelling time</i> kapal tinggi yang artinya dapat menyebabkan antrian kapal di areal labuh yang bisa menjadi <i>issue</i> Nasional.</p> <p>Pada setiap perencanaan penyandaran kapal, cabang Panjang telah menandatangani Kesepakatan Pelayanan Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Panjang yang berisi Data Kapal, Pembagian Tanggung Jawab, Isi Kesepakatan.</p>	<p>a. Melakukan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> (KSOP, GM Pelindo Regional 2 Panjang, INSA, APBMI dan Asosiasi lainnya agar ditetapkan pelayanan 24/7.</p> <p>b. Memberikan alternatif dan sanksi apabila tidak dapat dilaksanakannya kegiatan 24/7. Alternatif yang ditawarkan dapat berupa pemanfaatan gudang baik lini 1 maupun lini 2 yang berada di pelabuhan Panjang dengan membuat kesepakatan/kerja sama dengan mitra dan Pelindo Regional 2 Panjang</p> <p>c. Membuat komitmen dengan pengguna jasa dengan isi kesepakatan untuk melabuhkan kapal setelah perpanjangan masa tambat pertama dengan biaya ditanggung mitra</p> <p>d. Membuat komitmen dengan mitra untuk melakukan kegiatan 24/7 per kapal.</p>	<p>Branch Manager Cabang Panjang 31 Oktober 2022</p> <p>31 Oktober 2022</p> <p>30 November 2022</p> <p>30 November 2022</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>2</p>

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
10.	<p><i>Pemakaian Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL)</i></p> <p>Dalam memenuhi kekurangan tenaga kerja, Cabang Panjang menggunakan Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) untuk pekerjaan administrasi maupun pekerjaan operasional (operator, foreman).</p> <p>Periode September 2021 s.d. Maret 2022 upah TKHL per hari sebesar Rp140.000 dan kelebihan kerja sebesar Rp70.000 per hari, sedangkan mulai April 2022 berdasarkan Berita Acara Nomor UM.339/11/4/1/PJG.PTP-22 tanggal 11 April 2022 tentang Penyesuaian Honor/Upah Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Panjang, termasuk ada tambahan tunjangan kompetensi yang bersifat tetap setiap bulannya.</p>	<p>a. <i>Branch Manager</i> Cabang Panjang berkoordinasi dengan Kantor Pusat terkait peraturan sebagai acuan dalam penetapan komponen upah, jenis dan sifat pekerjaan yang diperbolehkan dikerjakan oleh TKHL.</p> <p>b. Memenuhi persyaratan administrasi pengelolaan TKHL terkait dengan Perjanjian Kerja</p> <p>c. Mereviu Berita Acara Nomor UM.339/11/4/1/PJG.PTP-22 tanggal 11 April 2022 tentang Penyesuaian Honor/Upah Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Panjang.</p>	<p><i>Branch Manager</i> <i>Cabang Panjang</i> 30 November 2022</p>	2

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
11.	<p><i>Inkonsistensi Pencatatan Beban Pegawai pada Laporan Keuangan Agustus 2022 PTP Cabang Panjang</i></p> <p>Dari kutipan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) Nomor KP.412/30/9/3/PTP-21 tanggal 30 September 2021 tentang penempatan Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) pada posisi <i>Senior Administrator</i> Pengendalian Operasi pada Divisi Operasi Kantor Pusat diketahui bahwa :</p> <p>a. Rekap jurnal <i>adjustment</i> atas beban 4 pegawai yang mutasi pada Laporan Keuangan periode Oktober 2021 s.d Agustus 2022 di PTP Cabang Panjang sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Adanya pencatatan jurnal <i>adjustment</i> dari periode Oktober s.d Desember 2021 oleh divisi Keuangan PTP Pusat atas reklasifikasi beban pegawai 4 orang pegawai yang dimutasi, dikarenakan SDM PTP Pusat memberikan rekapitulasi atas biaya 4 orang pegawai yang mutasi tersebut. Namun untuk rekapitulasi dari bulan Januari 2022 s.d Juli 2022 SDM PTP Pusat tidak belum memberikan rekap di bulan berjalannya, jurnal <i>adjustment</i> periode januari 2022 s.d juli 2022 tidak dicatat diperiode berjalan namun dicatat di bulan Agustus 2022. Beban pegawai bulan agustus 2022 turun drastis dikarenakan adanya jurnal <i>adjustment</i> selama 8 bulan (Januari 2022 s.d Agustus 2022) dari 4 pegawai yang dimutasi ke PTP Pusat. 	<p>a. Membuat surat dinas kepada Direktur Keuangan & SDM PTP untuk meminta data rekapitulasi biaya pegawai yang di mutasi berdasarkan SPPT.</p> <p>b. Melakukan jurnal koreksi terkait dengan pembebanan 4 pegawai yang dimutasi berdasarkan SPPT.</p>	<p><i>Branch Manager Cabang Panjang</i></p> <p>31 Oktober 2022</p>	1

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
	<p>b. Beban Pegawai pada Laporan Keuangan periode Juli 2022 dan Agustus 2022 PTP Cabang Panjang</p> <p>Pencatatan atas beban pegawai di PTP Cabang Panjang pada bulan Agustus 2022 sebesar Rp111.572.208,00 atau turun sebesar Rp764.378.150,00 (87,26%) jika dibandingkan dengan periode Juli 2022 sebesar Rp875.950.358,00 apabila dibandingkan dengan periode Agustus 2021 maka turun sebesar Rp611.355.852,00 (84,57%).</p> <p>Hal ini berarti adanya penurunan atas pencatatan biaya pegawai lebih dari setengah biaya pegawai yg dicatatkan dibulan sebelumnya maupun tahun sebelumnya di periode yang sama.</p>			
12.	<p>Kesalahan Pada Pencatatan Revenue Sharing Atas Dermaga C1 & C2 antara PTP dengan IKT</p> <p>Berdasarkan pengujian pada Berita Acara Kesepakatan Nomor UM.339/30/9/5/IKT.21 dan UM.339/30/9/8/PTP.21 tanggal 30 bulan September tahun 2021 Antara PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) dan PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) tentang kerja sama Pelayanan Jasa Pelabuhan Di Terminal RORO (Dermaga C1 dan C2 Pelabuhan Panjang) diketahui bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum diterimanya Berita Acara Pencocokan dan Penelitian (Coklit) atas kegiatan bongkar muat yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan IKT serta membuat BA Coklit & BA Rekonsiliasi Afiliasi yang ditanda tangani oleh para pihak di setiap periode berjalan. Melakukan pembuatan jurnal akrual atas BYMH Revenue sharing kepada IKT berdasarkan BA Coklit & BA Rekonsiliasi Afiliasi. 	<p>Branch Manager Cabang Panjang</p> <p>31 Oktober 2022</p> <p>10 November 2022</p>	<p>1</p> <p>2</p>

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

17

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
	<ul style="list-style-type: none"> Tidak adanya pencatatan bulanan atas BYMH revenue sharing dari periode Januari 2022 s.d Agustus 2022 ke PT Indonesia Kendaraan Terminal. Tidak adanya Berita Acara Rekonsiliasi Afiliasi antara PTP dengan IKT. Pencatatan biaya buruh dan tenaga kerja atas PT IKT sebesar Rp1.141.757.455,00 	3. Membuat jurnal reklasifikasi/ <i>adjustment</i> atas salah pembebanan biaya buruh dan tenaga kerja ke beban biaya KSMU Kompensasi Non Tanah dan Bangunan.	Branch Manager Cabang Panjang 31 Oktober 2022	1
13.	<p><i>Perbedaan Pencatatan dan Perhitungan Revenue Sharing PTP Cabang Panjang</i></p> <p>Data rekapitulasi perhitungan revenue sharing PTP Cabang Panjang periode Januari 2022 s.d Agustus 2022 diketahui bahwa :</p> <ol style="list-style-type: none"> Total <i>Revenue sharing</i> PTP ke SPMT sebesar Rp17.262.725.326,00 Pencatatan dan pembayaran <i>revenue sharing</i> PTP ke SPMT sebesar Rp20.197.405.885,00 Terdapat kelebihan pencatatan biaya <i>revenue sharing</i> sebesar Rp2.934.680.559, 	Melakukan koordinasi dengan Direktorat Komersial PTP Pusat dan/atau Pelindo Regional 2 Panjang agar kelebihan pembebanan dan pembayaran revenue sharing sebesar Rp2.934.680.559,00 dapat dikompensasikan dengan tagihan revenue sharing dibulan berikutnya.	Branch Manager Cabang Panjang 31 Oktober 2022	1

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
14.	<p>Laporan Pemantauan Risiko PTP Cabang Panjang belum Memadai</p> <p>Berdasarkan pengujian atas laporan pemantauan risiko PTP Cabang Panjang diketahui dari 32 (tiga puluh dua) risiko tersebut terdapat mitigasi risiko dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Terdapat 4 (empat) Risiko yang materi laporannya belum mencerminkan upaya mitigasi risiko yang dilakukan hanya meng-<i>copy paste</i> bulan sebelumnya atau dari rencana mitigasi risiko (Realisasi sama dengan Rencana Mitigasi). Kondisi ini tidak mencerminkan kondisi riil yang dilakukan.</p> <p>b. Laporan Realisasi Mitigasi Risiko yang belum melampirkan bukti/dokumen pendukung</p> <p>Cabang Panjang sudah membuat Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan Risiko beserta beberapa bukti pendukung realisasi mitigasinya di tahun 2022, namun semua itu hanya sebatas pemenuhan kebutuhan data audit saja belum secara khusus menyampaikan laporan tersebut kepada subdivisi Manajemen Risiko Kantor Pusat. Informasi yang didapat dari subdivisi Manajemen Risiko laporan yang diterima baru di bulan Maret saja dan beberapa bukti/dokumen pendukungnya. Hal ini disebabkan karena menumpuknya beban kerja pada personil yang ditunjuk sebagai PIC untuk pelaporan Pelaksanaan dan Pemantauan Risiko pada setiap bulannya. Terlepas dari hal tersebut Cabang Panjang sudah menunjuk PIC baru yang nantinya akan bertanggung jawab atas pelaporan Pelaksanaan dan Pemantauan Risiko di setiap bulannya.</p>	<p>Menyampaikan Pemantauan Risiko bulan September 2022 dan periode bulan selanjutnya kepada subdivisi Manajemen Risiko yang memuat kondisi yang riil/<i>valid</i> beserta bukti pendukung.</p>	<p>Branch Manager Cabang Panjang</p> <p>5 Oktober 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
15.	<p><i>Belum Sterilnya Tempat Penyimpanan Grab di Area Dermaga</i></p> <p>Pada salah satu pemantauan risiko Cabang Panjang yaitu Kecelakaan Kerja di Tempat Penyimpanan <i>Grab</i> dengan rencana mitigasi risikonya yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mensosialisasikan kepada para pekerja Operasional terkait <i>safety</i> di lapangan b. Memberikan rambu-rambu peringatan dilarang mendekati disekitar lokasi penyimpanan <i>Grab</i> <p>Namun saat peninjauan ke lapangan tidak ditemukan rambu-rambu peringatan dilarang mendekati area lokasi penyimpanan <i>Grab</i> dan masih didapati area yang sudah dikhususkan dengan memasang <i>barrier</i> beton untuk tempat penyimpanan <i>grab</i> masih digunakan untuk parkir truk saat menunggu muatan didalam tongkang/kapal. Tidak ada tindakan peneguran oleh <i>security</i> yang berjaga pada Dermaga D kepada supir-supir yang memarkirkan truknya pada area penyimpanan <i>Grab</i> . Didapati juga area penyimpanan <i>Grab</i> yang tidak dipasang <i>barrier</i> beton untuk menghindari tersenggolnya <i>Grab</i> pada truk yang melakukan kegiatan bongkar muat di Dermaga.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Memasang rambu-rambu peringatan dilarang mendekati disekitar lokasi penyimpanan <i>Grab</i>. b. Memasang <i>barrier</i> beton/ sejenisnya untuk menandakan area penyimpanan <i>Grab</i>. 	<p><i>Branch Manager Cabang Panjang</i></p> <p>30 November 2022</p>	2

Ringkasan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
1.	<p>Aktiva Tetap belum Dilakukan Pembebanan Penyusutan</p> <p>Berdasarkan Kartu Aset Tetap per 31 Juli 2022 terdapat 2 aktiva tetap yang belum dilakukan penyusutan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rampdoor jalur pipa POME tahun perolehan 19 Januari 2022, umur ekonomis 60 bulan, tahun berakhir 19 Januari 2026, dengan nilai perolehan sebesar Rp224.378.505,00 2. 5 set pipa <i>Carbon Steel</i> tahun perolehan 18 Desember 2022 umur ekonomis 120 bulan, tahun berakhir 18 Desember 2030, dengan nilai perolehan sebesar Rp80.000.000,00 <p>Pengelolaan Kartu Aset Tetap beserta pembebanan penyusutan dilakukan oleh Kantor Pusat, Cabang bersifat pasif dalam hal ini. Telah dilakukan pula konfirmasi ke Kantor Pusat, bahwa hal tersebut didasarkan dari awal atas hasil audit dari <i>Earst & Young</i> selaku Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak melakukan penyusutan, dan selanjutnya akan ditanyakan lebih lanjut ke KA</p>	<p>Melakukan koordinasi ke Kantor Pusat terhadap validitas aktiva tetap berupa <i>Rampdoor</i> Jalur Pipa POME dan 5 Set Pipa Carbon Steel yang belum dilakukan penyusutan</p>	<p>Branch Manager Cabang Panjang</p>	<p>1</p>

Ringkasan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
2.	<p><i>Kurangnya Perawatan pada Alat Bantu Bongkar Muat</i></p> <p>Berdasarkan kunjungan kelapangan ke wilayah kerja PT PTP <i>Lini I</i> khususnya disepanjang Dermaga lapangan penumpukan barang dan area penumpukan alat bongkar muat non mekanis ditemukan posisi <i>Grab</i> yang penyimpanannya tampak kurang rapi dan <i>Hopper</i> yang kurang perawatan</p>	<p>a. Membuat jadwal pengecekan alat secara periodik bersama Tim JPPI area Panjang dan diketahui atasan</p> <p>b. Melakukan penyusunan alat ditempat yang aman dan tidak mengganggu aktifitas kerja B/M</p> <p>c. Melakukan perawatan/pemberian pelumas (anti karat) terhadap alat yang berpotensi korosif</p>	<i>Branch Manager Cabang Panjang</i>	1
3.	<p><i>Penempatan Rampdoor di Lapangan belum Dikenakan Kontribusi Penumpukan</i></p> <p>Pada saat pengecekan ke dermaga dan lapangan terdapat <i>Ramdoor</i> diantaranya milik :</p> <p>a. PT Kekar Insan Sejahtera (KIS)</p> <p>b. PT Lautan Kuda Mas</p> <p>c. PT Baruna Karya Investama</p> <p>d. PT Sagora</p> <p><i>Rampdoor</i> milik mitra tersebut apabila selesai kegiatan bongkar muat tidak dikeluarkan dari area pelabuhan/ditempatkan disisi lapangan. Selama ini Cabang Panjang belum mengenakan jasa penumpukan terhadap alat-alat tersebut (BPRP).</p>	Mengusulkan/membuat agar dapat dibuatkan BPRP dan ditagihkan sewa penumpukan	<i>Branch Manager Cabang Panjang</i>	1

Ringkasan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
4.	<p><i>SK GM tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang Telah Habis Masa Berlakunya</i></p> <p>Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Panjang adalah Sdr. Teguh Widodo dengan jabatan DM Operasi yang juga merupakan User dari pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT PTP Cabang Panjang. Surat keputusan <i>General Manager</i> Nomor HK.55/16/04/01/OPS.PJG.PTP-21 Tanggal 16 April 2021 Tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Panjang sudah habis masa berlakunya.</p>	<p>Merevisi atau memperbaharui SK GM PT PTP Cabang Panjang Nomor HK.55/16/04/01/OPS.PJG.PTP-21 Tanggal 16 April 2021 Tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Panjang.</p>	<i>Branch Manager Cabang Panjang</i>	1
5.	<p><i>Pencatatan Biaya Tahun 2021 yang Dicatat di Tahun 2022</i></p> <p>Masih adanya pencatatan biaya tahun 2021 di tahun 2022 sebesar Rp1.713.700.098,00 dikarenakan pencatatan biaya akrual tidak dilakukan di tiap periode berjalan sehingga menyebabkan biaya tahun 2022 tidak sepenuhnya menjadi biaya tahun tersebut dikarenakan adanya pencatatan biaya yang melewati tahun anggaran yang bersangkutan. Hal ini agar menjadi perhatian manajemen PTP Cabang Panjang penyajian laporan keuangan dapat merepresentasikan kondisi keuangan dari PTP Cabang Panjang secara akurat dan <i>valid</i>.</p>	<p>Melakukan pencatatan atas biaya-biaya akrual di periode berjalan sesuai dengan nilai kontrak yang berlaku agar tidak membebani anggaran di periode tahun berikutnya.</p>	<i>Branch Manager Cabang Panjang</i>	1

Ringkasan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

23

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
6.	<p><i>Pembuatan PO Berdasarkan Kegiatan Per Kapal</i></p> <p>Dalam masa pengujian, auditor kesulitan untuk mencari beban buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) per kegiatan dikarenakan Keuangan PTP Cabang Panjang melakukan pembuatan 1 (satu) PO, TTB dan <i>Invoice</i> untuk beberapa kegiatan sesuai dengan tagihan dari <i>Vendor</i>.</p>	<p>Pembuatan <i>Purchase Order</i> (PO) untuk pembayaran Beban Buruh (TKBM) agar dapat dilakukan per kegiatan/kapal untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan.</p>	<p><i>Branch Manager Cabang Panjang</i></p>	1

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

1. Implementasi Sistem Uper belum Diterapkan

Kondisi

Sebagai tindak lanjut rekomendasi atas audit tahun 2021 atas temuan Saldo Uang untuk Dipertanggungkan (UPER) dan Uang Titipan (UTIP) di Neraca belum menggambarkan Keadaan Sebenarnya, PTP Panjang telah mengirimkan Nota Dinas ke Direktur Operasi nomor KU.310/7/10/3/PJG.PTP-21 perihal Permohonan Pembuatan Akun Sim Barang dan Nota Dinas ke SM Sistem Informasi nomor KU.310/29/12/2/PJG.PTP-21 perihal Permohonan Aktivasi Uper pada SIMKEU *Oracle* Keuangan. Saat ini SIMBarang untuk penerapan Uper sudah tersedia namun belum diimplementasikan.

Cara pembayaran pelunasan nota dari Pengguna Jasa selama ini dengan metode termin pembayaran selama 14, 30, 90 hari dan pengenaan pembayaran di muka (*Down Payment* /DP) sisanya dilunasi 14 hari.

Terdapat 3 Pengguna Jasa yang dikenakan DP dengan sisa pembayaran dilunasi 14 hari, yaitu :

- ✓ PT Cipta Eco Swadaya dengan DP 30%;
- ✓ PT Jetcap Trisera Indonesia dengan DP 50%;
- ✓ PT Trans Nusantara Logistik dengan DP 50%.

Pengenaan DP merupakan pembayaran sebagian di muka, tidak bisa disamakan dengan Uper dikarenakan pencatatan pembayaran DP dilakukan secara manual sampai saat perhitungan kompensasi (*off set*) dengan realisasi nantinya. Besaran perhitungan DP juga tidak melalui SIMBarang. Pembayaran DP tersebut dicatat di SIMKEU sebagai UPER atau UTIP.

Meskipun sudah ada pengenaan DP namun hanya PT Jetcap Trisera Indonesia yang sesuai kesepakatan, sedangkan 2 (dua) Pengguna Jasa yang lain implementasinya tidak sesuai kesepakatan, baik dari besaran DP maupun termin pembayaran, sebagai gambaran berdasarkan *aging* piutang per 31 Agustus 2022 sebagaimana tabel berikut :

PENGGUNA JASA	NO. NOTA	TGL. NOTA	TAGIHAN	PIUTANG	0-30 HARI	31-90 HARI	PERSENTASE DP
PT CIPTA ECO SWADAYA	'0100212220001353	16-Aug-22	960.328.720	645.980.160	645.980.160	-	32,73%
PT. TRANS NUSANTARA LOGISTIK	'0100212220001251	22-Jul-22	525.270.454	525.270.454	-	525.270.454	0,00%
PT. TRANS NUSANTARA LOGISTIK	'0100212220001450	25-Aug-22	525.270.454	263.492.724	263.492.724	-	49,84%

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

1. Implementasi Sistem Uper belum Diterapkan

Kriteria

Peraturan Direksi No. HK.55/6/8/1/PTP-21 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembayaran *Auto Collection*, *Cash Management System* (CMS), *Supply Chain Financing* (SCF), Sistem Uper dan Termin Pembayaran di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok :

- a. Pasal 10 (1) : “Pelanggan yang belum menerapkan Sistem Otomatisasi Pembayaran (*Auto Collection*, CMS, SCF), wajib memakai Sistem UPER dan harus membayar UPER sebelum mengajukan permintaan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan/atau perpanjangan Pelayanan Jasa Kepelabuhanan dan langsung diperhitungkan dengan nota”;
- b. Pasal 10 (2) : “Perhitungan besaran UPER Pelayanan Jasa didasarkan atas perhitungan perkiraan besarnya biaya Pelayanan Jasa yang diberikan dikalikan faktor yang layak agar tidak menimbulkan piutang”;
- c. Pasal 10 (3) : “Pembayaran UPER dilakukan via transfer Bank ke Rekening Perusahaan”;
- d. Pasal 10 (4) : “Bukti pembayaran UPER harus sudah diserahkan sebelum penetapan PPKB”;
- e. Pasal 10 (5) : “Apabila jumlah UPER lebih kecil dari realisasi, yang disebabkan oleh penyimpangan terhadap formula perhitungan yang ditetapkan, maka petugas yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Lingkungan Perusahaan”;
- f. Pasal 10 (6) : “Apabila jumlah UPER lebih besar dari realisasi maka :
 - 1) Sisa UPER diprioritaskan untuk melunasi hutangnya (bila ada);
 - 2) Bagi yang tidak mempunyai tunggakan hutang, maka sisa UPER segera dikembalikan secara otomatis kepada Pelanggan dengan melampirkan bukti sisa Uper yang asli dan kartu sisa UPER;
 - 3) Sisa UPER tidak dapat digunakan untuk pembayaran UPER baru;
 - 4) Pengembalian sisa UPER kepada Pelanggan dilakukan melalui transfer antar rekening Bank dan tidak diperbolehkan mempergunakan *Check* tunai atau kas tunai.

Root Cause

- a. Belum ada pemahaman yang seragam terhadap penerapan sistem uper;
- b. Staf yang bertugas belum memahami implementasi pengenaan Uper pada SIMBarang.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

26

1. Implementasi Sistem Uper belum Diterapkan

Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Piutang meningkat yang akan berpengaruh juga terhadap *Average Collection Period* (ACP);
- b. Tertundanya arus kas masuk;
- c. Pencatatan pembayaran dengan DP dilakukan secara manual.

Rekomendasi:

PIC Temuan
Audit/Batas Waktu

Prioritas

Mengimplementasikan sistem Uper melalui aplikasi SIMBarang untuk setiap pelayanan kegiatan bongkar muat

Branch Manager
Cabang Panjang
30 November 2022

2

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

2. Lama Penerbitan Pranota dari Kegiatan Selesai

Kondisi

Berdasarkan laporan produksi pranota periode Januari – 8 September 2022 dapat dirangkum sebagaimana tabel berikut :

URAIAN	PRANOTA		NOMINAL	
	Kuantitas	Persentase	Rupiah	Persentase
0 - 1 Hari	1894	58,31%	28.788.233.870	39,09%
2 - 7 Hari	1101	33,90%	40.542.720.183	55,06%
8 - 30 Hari	186	5,73%	2.565.428.248	3,48%
Lebih dari 30 Hari	67	2,06%	1.741.679.882	2,37%
JUMLAH	3248	100,00%	73.638.062.182	100,00%

Dari tabel tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Lamanya penerbitan pranota yang sesuai ketentuan (0 – 1 hari) secara kuantitas mencapai 58,31% atau sebanyak 1.894 pranota; sedangkan 41,69% atau 1.354 pranota penerbitannya lebih dari 2 (dua) hari;
- Lamanya penerbitan pranota yang sesuai ketentuan (0 – 1 hari) secara nominal mencapai 39,09% atau sebesar Rp28.788.233.870,00 sedangkan 60,91% atau Rp44.849.828.313,00 penerbitan pranota lebih dari 2 (dua) hari;
- Jenis layanan atas penerbitan pranota : OPP/OPT, *JIB Crane*, GLC, *Forklift*, Kontribusi Alat, Alat Mekanis, Alat Non Mekanis, Dermaga, Kebersihan, Penumpukan, *Share Handling Terminal Multipurpose*, *Share Handling Terminal* Curah Kering, Timbangan, Lain-Lain, dan Retribusi Kendaraan. Rata-rata lama penerbitan nota adalah 4,06 hari, paling lama adalah 116 hari pada penerbitan pranota dermaga, dan kebersihan.

Kriteria

Nota Dinas nomor UM.330/29/12/1/SDM.PTP-20 Perihal Penerbitan Nota Jasa Kepelabuhanan di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok butir 2a., b., c. sebagai berikut :

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

2. Lama Penerbitan Pranota dari Kegiatan Selesai

Kriteria

- Agar petugas *billing* yang melakukan pencetakan nota jasa kepelabuhanan dapat melakukan konfirmasi pranota kepada pengguna jasa melalui media yang tercatat dengan baik seperti *email*, aplikasi perpesanan (*whatsapp*, *telegram*, *line*, dan lainnya), maupun media lainnya;
- Petugas *billing* dapat melakukan pencetakan nota jasa kepelabuhanan setelah mendapatkan konfirmasi dari pengguna jasa terkait kesesuaian detail pranota atau maksimal 1x24 jam dari pranota disampaikan ke pengguna jasa;
- Petugas *billing* dapat mengambil keputusan untuk mencetak nota tanpa konfirmasi dari pengguna jasa terkait jika pengguna jasa terkait tidak memberikan respon setelah 1x24 jam dari penyerahan pranota.

Root Cause

Lamanya penerbitan pranota sejak kegiatan selesai dilaksanakan dikarenakan menunggu kelengkapan dokumen pendukung yang harus dikonfirmasi ke Pengguna Jasa.

Implikasi Terhadap Bisnis

- Tertundanya Pengakuan pendapatan;
- Tertundanya penerimaan kas.

Rekomendasi:

Melakukan sosialisasi dan/atau surat edaran ke Pengguna Jasa terkait batas waktu penerbitan pranota paling lambat 1x24 jam sejak kegiatan selesai dilaksanakan

PIC Temuan
Audit/Batas Waktu

Branch Manager
Cabang Panjang
31 Oktober 2022

Prioritas

1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

3. Hasil Kerja Sama dengan PT Lintas Nusantara Prima belum Optimal

Kondisi

Salah satu kerja sama antara Cabang Panjang dengan para mitra adalah kerja sama penanganan bongkar muat curah kering dan curah cair dengan PT Lintas Nusantara Prima (PT LNP). Sepanjang Tahun 2022 kerja sama tersebut dituangkan dalam dalam 3 (tiga) Berita Acara Kesepakatan sebagai berikut:

- Berita Acara (BA) Kesepakatan Bersama Nomor UM.339/05/1/3/OPS.PJG-PTP-22 tanggal 5 Januari 2022 tentang Kerja Sama Mitra Usaha *Handling* Bongkar Muat *Cargo* Curah Kering (*Soya Bean meal, Soya Bean, Jagung dan Curah Kering Lainnya*) di Pelabuhan Panjang. Dalam BA ini diantaranya memuat tarif bongkar muat di Terminal Curah Kering (Kade D dan F) dan di Terminal *Multipurpose* (Kade A, B dan C) Pelabuhan Panjang;
- BA Kesepakatan Bersama Nomor UM.339/08/04/01/OPS.PJG-PTP-22 tanggal 8 April 2022 tentang Kerja Sama Mitra Usaha *Handling* Bongkar Muat *Cargo* Curah Cair di Pelabuhan Panjang. Dalam BA ini diantaranya memuat tarif bongkar muat di Terminal Curah Cair (Kade D dan F) dan di Terminal *Multipurpose* (Kade A, B dan C) Pelabuhan Panjang;
- BA Kesepakatan Bersama Nomor UM.339/06/05/1/OPS.PJG-PTP-22 tanggal 6 Mei 2022 tentang Kerja Sama Mitra Usaha *Handling* Bongkar Muat *Cargo* Curah Kering dan Curah Cair di Dermaga G Pelabuhan Panjang. Dalam BA ini diantaranya memuat tarif bongkar muat di Dermaga G (Tunas Baru Lampung) Pelabuhan Panjang.

Berdasarkan pengujian atas kerja sama tersebut diketahui kondisi sebagai berikut:

- Kerja sama *handling* bongkar muat dengan PT LNP selaku PBM dilaksanakan terhadap cargo milik PT LNP itu sendiri, sehingga PT LNP adalah mitra yang merupakan *cargo owner* sekaligus sebagai PBM yang melakukan *handling* bongkar muat atas *cargo* miliknya. Dalam BA Kesepakatan, selain diatur tarif yang dikenakan kepada PT LNP selaku *cargo owner* (komponen pendapatan), diatur juga komponen biaya KSMU yang akan dibayarkan kepada PT LNP, dengan salah satu contoh berikut ini

a. Tarif Bongkar di Terminal Curah Kering (Kade D dan F) Pelabuhan Panjang

NO	URAIAN	TARIF KSMU	KSMU LNP	PTP	KETERANGAN
1	Stevedoring	21.285	2.157	2.530	Biaya KSMU Melalui :
	W		10.000		Stevedoring KSMU : 2.157/ton
	HIK		4.767		TKBM : 10.000/ton
	Dana Perumahan		1.831		HIK & Perumahan : 6.598/ton
					Total KSMU : 18.755/ton
2	Jasa Dermaga	2.250	-	2.250	
3	Kebersihan	200	-	200	
4	Gantry Jib Crane	16.000	-	16.000	JIKA SANDAR DI DERMAGA F MAKA TIDAK ADA JASA GANTRY JIB CRANE
5	Hopper	3.000	-	3.000	
		42.735	18.755	23.980	

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

3. Hasil Kerja Sama dengan PT Lintas Nusantara Prima belum Optimal

Kondisi

- b. Berdasarkan revidi atas dokumen BA Kesepakatan tersebut diketahui bahwa diantaranya memuat pelaksanaan kewajiban pembayaran oleh masing-masing pihak. PTP Cabang panjang melaksanakan pembayaran Biaya KSMU kepada PT LNP setelah kegiatan bongkar muat selesai maksimal 14 hari. Sedangkan PT LNP melaksanakan pembayaran paket *handling* kepada PTP cabang Panjang maksimal 30 hari sejak *invoice* diterima. Pengujian lebih lanjut terkait dengan arus kas masuk dan keluar terkait dengan kerja sama ini diketahui bahwa sampai dengan masa audit berakhir, terdapat tagihan dari PT LNP yang belum dibayarkan oleh Cabang Panjang sebagaimana tabel di bawah ini.

NO	NAMA KAPAL	DPP	PPN	JUMLAH TAGIHAN	POT PPH 23	TANGGAL PENAGIHAN	JUMLAH YANG DIBAYARKAN	TANGGAL PEMBAYARAN
1	MT SAMBONG HERA	77.954.747	8.575.022	86.529.769		02-Aug-22		BELUM
2	MV. GEMINI CONFEDENCE	492.107.194	54.131.791	546.238.985		02-Aug-22		BELUM
Total				632.768.755				

Sebaliknya, terdapat juga piutang PTP atas nota-nota yang sudah diterbitkan namun belum dibayar/dilunasi oleh PT LNP, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

No	No Nota	Tanggal Nota	Kapal	Status Lunas	Tanggal Lunas	Jumlah Tagihan
1	0100212220001281	29-JUL-22	MV. GEMINI CONFIDANCE	BELUM		836.921.878
2	0100212220001316	08-AUG-22	MT. SAMBONG HERA	BELUM		118.296.595
3	0100212220001490	29-AUG-22	MV. AENEAS	BELUM		6.548.455
4	0100212220001491	29-AUG-22	MV. AENEAS	BELUM		20.619.370
5	0100212220001484	30-AUG-22	MV. AENEAS	BELUM		1.035.249.990
Total						2.017.636.288

Tabel di atas menunjukkan bahwa masih terdapat arus kas yang belum diterima atas pendapatan yang menjadi hak PTP yaitu sebesar Rp2.017.636.288,00 dan diantaranya sebesar Rp955.218.473,00 (Rp836.921.878,00 + Rp118.296.595,00) telah melewati jangka waktu yang telah disepakati yaitu maksimal selama 30 hari sejak *invoice*/nota diterima.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

3. Hasil Kerja Sama dengan PT Lintas Nusantara Prima belum Optimal

Kondisi

- c. Pengujian lebih lanjut atas margin per kapal yang diperoleh oleh PTP dengan pola kerja sama ini selama tahun 2022 ditunjukkan pada tabel-tabel di bawah ini.

KAPAL : MV PAC ACHERNAR
CARGO : SOYA BEAN MEAL
VOLUME : 27.459

NO	PENDAPATAN			BIAYA I			MARGIN I	KONSESI	REVENUE SHARING		BIAYA II	MARGIN PTP	KETERANGAN
	URAIAN	TARIF	PENDAPATAN	URAIAN	TARIF BIAYA	BIAYA			SPMT	REGIONAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4-7) x 2,5%	10 5 % x 4	11 25 % x 4	12 (9+10+11)	13 (8 - 12)	14
1	Stevedoring	21.285	584.464.815	KSMU	18.755	514.993.545	69.471.270	1.736.782	29.223.241	146.116.204	177.076.226	- 107.604.956	
2	Jasa Dermaga	2.250	61.782.750	Jasa Dermaga	-	-	61.782.750	1.544.569	3.089.138	15.445.688	20.079.394	41.703.356	
3	Kebersihan	200	5.491.800	Kebersihan	150	4.118.850	1.372.950	34.324	274.590	1.372.950	1.681.864	- 308.914	
4	Jib Crane	16.000	439.344.000	Jib Crane	-	-	439.344.000	10.983.600	21.967.200	109.836.000	142.786.800	296.557.200	
5	Hopper	3.000	82.377.000	Hopper	2.250	61.782.750	20.594.250	514.856	-	-	514.856	20.079.394	Di luar BASO
Total		42.735	1.173.460.365		21.155	580.895.145	592.565.220	14.814.131	54.554.168	272.770.841	342.139.140	250.426.080	
Persentase Margin							50,50%					21,34%	

KAPAL : MV HAMPTON SKY
CARGO : SOYA BEAN MEAL
VOLUME : 13.053

NO	PENDAPATAN			BIAYA I			MARGIN I	KONSESI	REVENUE SHARING		BIAYA II	MARGIN PTP	KETERANGAN
	URAIAN	TARIF	PENDAPATAN	URAIAN	TARIF BIAYA	BIAYA			SPMT	REGIONAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4-7) x 2,5%	10 5 % x 4	11 25 % x 4	12 (9+10+11)	13 (8 - 12)	14
1	Stevedoring	21.285	277.833.105	KSMU	18.755	244.809.015	33.024.090	825.602	13.891.655	69.458.276	84.175.534	- 51.151.444	
2	Jasa Dermaga	2.250	29.369.250	Jasa Dermaga	-	-	29.369.250	734.231	1.468.463	7.342.313	9.545.006	19.824.244	
3	Kebersihan	200	2.610.600	Kebersihan	150	1.957.950	652.650	16.316	130.530	652.650	799.496	- 146.846	
	KSMU Alat										-	-	
4	Jib Crane	16.000	208.848.000	Jib Crane	-	-	208.848.000	5.221.200	10.442.400	52.212.000	67.875.600	140.972.400	
5	Hopper	3.000	39.159.000	Hopper	2.250	29.369.250	9.789.750	244.744	-	-	244.744	9.545.006	Di luar BASO
Total		42.735	557.819.955		21.155	276.136.215	281.683.740	7.042.094	25.933.048	129.665.239	162.640.380	119.043.360	
Persentase Margin							50,50%					21,34%	

KAPAL : MV DORRIC ARROW
CARGO : SOYA BEAN MEAL
VOLUME : 12.661

NO	PENDAPATAN			BIAYA I			MARGIN I	KONSESI	REVENUE SHARING		BIAYA II	MARGIN PTP	KETERANGAN	
	URAIAN	TARIF	PENDAPATAN	URAIAN	TARIF BIAYA	BIAYA			SPMT	REGIONAL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4-7) x 2,5%	10 5 % x 4	11 25 % x 4	12 (9+10+11)	13 (8 - 12)	14	
1	Stevedoring	21.285	269.489.385	KSMU	18.755	237.457.055	32.032.330	800.808	13.474.469	67.372.346	81.647.624	-	49.615.294	
2	Jasa Dermaga	2.250	28.487.250	Jasa Dermaga	-	-	28.487.250	712.181	1.424.363	7.121.813	9.258.356		19.228.894	
3	Kebersihan	200	2.532.200	Kebersihan	150	1.899.150	633.050	15.826	126.610	633.050	775.486	-	142.436	
4	Jib Crane	16.000	202.576.000	Jib Crane	-	-	202.576.000	5.064.400	10.128.800	50.644.000	65.837.200		136.738.800	
5	Hopper	3.000	37.983.000	Hopper	2.250	28.487.250	9.495.750	237.394	-	-	237.394		9.258.356	Di luar BASO
Total		42.735	541.067.835		21.155	267.843.455	273.224.380	6.830.610	25.154.242	125.771.209	157.756.060		115.468.320	
Persentase Margin							50,50%						21,34%	

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

3. Hasil Kerja Sama dengan PT Lintas Nusantara Prima belum Optimal

Kondisi

KAPAL : MV HAI JIN
CARGO : SOYA BEAN MEAL
VOLUME : 25.005

NO	PENDAPATAN			BIAYA I			MARGIN I	KONSESI	REVENUE SHARING		BIAYA II	MARGIN PTP	KETERANGAN
	URAIAN	TARIF	PENDAPATAN	URAIAN	TARIF BIAYA	BIAYA			SPMT	REGIONAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								(4-7) x 2,5%	5 % x 4	25 % x 4	(9+10+11)	(8 - 12)	
1	Stevedoring	21.285	532.231.425	KSMU	18.755	468.968.775	63.262.650	1.581.566	26.611.571	133.057.856	161.250.994	-	97.988.344
2	Jasa Dermaga	2.250	56.261.250	Jasa Dermaga	-	-	56.261.250	1.406.531	2.813.063	14.065.313	18.284.906	-	37.976.344
3	Kebersihan	200	5.001.000	Kebersihan	150	3.750.750	1.250.250	31.256	250.050	1.250.250	1.531.556	-	281.306
4	Jib Crane	16.000	400.080.000	Jib Crane	-	-	400.080.000	10.002.000	20.004.000	100.020.000	130.026.000	-	270.054.000
5	Hopper	3.000	75.015.000	Hopper	2.250	56.261.250	18.753.750	468.844	-	-	468.844	-	Di luar BASO
	Total	42.735	1.068.588.675		21.155	528.980.775	539.607.900	13.490.198	49.678.684	248.393.419	311.562.300	-	228.045.600
	Persentase Margin						50,50%					21,34%	

KAPAL : MV SANTA BARBARA
CARGO : SOYA BEAN MEAL
VOLUME : 13.588

NO	PENDAPATAN			BIAYA I			MARGIN I	KONSESI	REVENUE SHARING		BIAYA II	MARGIN PTP	KETERANGAN
	URAIAN	TARIF	PENDAPATAN	URAIAN	TARIF BIAYA	BIAYA			SPMT	REGIONAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								(4-7) x 2,5%	5 % x 4	25 % x 4	(9+10+11)	(8 - 12)	
1	Stevedoring	21.285	289.220.580	KSMU	18.755	254.842.940	34.377.640	859.441	14.461.029	72.305.145	87.625.615	-	53.247.975
2	Jasa Dermaga	2.250	30.573.000	Jasa Dermaga	-	-	30.573.000	764.325	1.528.650	7.643.250	9.936.225	-	20.636.775
3	Kebersihan	200	2.717.600	Kebersihan	150	2.038.200	679.400	16.985	135.880	679.400	832.265	-	152.865
4	Jib Crane	16.000	217.408.000	Jib Crane	-	-	217.408.000	5.435.200	10.870.400	54.352.000	70.657.600	-	146.750.400
5	Hopper	3.000	40.764.000	Hopper	2.250	30.573.000	10.191.000	254.775	-	-	254.775	-	Di luar BASO
	Total	42.735	580.683.180		21.155	287.454.140	293.229.040	7.330.726	26.995.959	134.979.795	169.306.480	-	123.922.560
	Persentase Margin						50,50%					21,34%	

KAPAL : MV STELLAR ARRAGVI
CARGO : SOYA BEAN MEAL
VOLUME : 11.004

NO	PENDAPATAN			BIAYA I			MARGIN I	KONSESI	REVENUE SHARING		BIAYA II	MARGIN PTP	KETERANGAN
	URAIAN	TARIF	PENDAPATAN	URAIAN	TARIF BIAYA	BIAYA			SPMT	REGIONAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								(4-7) x 2,5%	5 % x 4	25 % x 4	(9+10+11)	(8 - 12)	
1	Stevedoring	21.285	234.220.140	KSMU	18.755	206.380.020	27.840.120	696.003	11.711.007	58.555.035	70.962.045	-	43.121.925
2	Jasa Dermaga	2.250	24.759.000	Jasa Dermaga	-	-	24.759.000	618.975	1.237.950	6.189.750	8.046.675	-	16.712.325
3	Kebersihan	200	2.200.800	Kebersihan	150	1.650.600	550.200	13.755	110.040	550.200	673.995	-	123.795
4	Jib Crane	16.000	176.064.000	Jib Crane	-	-	176.064.000	4.401.600	8.803.200	44.016.000	57.220.800	-	118.843.200
5	Hopper	3.000	33.012.000	Hopper	2.250	24.759.000	8.253.000	206.325	-	-	206.325	-	Di luar BASO
	Total	42.735	470.255.940		21.155	232.789.620	237.466.320	5.936.658	21.862.197	109.310.985	137.109.840	-	100.356.480
	Persentase Margin						50,50%					21,34%	

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

3. Hasil Kerja Sama dengan PT Lintas Nusantara Prima belum Optimal

Kondisi

KAPAL : MV SAMBONG HERA
CARGO : MOLLASES
VOLUME : 10.501

NO	PENDAPATAN			BIAYA I			MARGIN I	KONSESI	REVENUE SHARING		BIAYA II	MARGIN PTP	KETERANGAN
	URAIAN	TARIF	PENDAPATAN	URAIAN	TARIF BIAYA	BIAYA			SPMT	REGIONAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								$(4-7) \times 2,5\%$	$5\% \times 4$	$25\% \times 4$	$(9+10+11)$	$(8-12)$	
1	Stevedoring	9.954	104.526.954	KSMU	7.424	77.959.424	26.567.530	664.188	5.226.348	26.131.739	32.022.274	-	5.454.744
2	Jasa Dermaga	2.250	23.627.250	Jasa Dermaga	-	-	23.627.250	590.681	1.181.363	5.906.813	7.678.856	-	15.948.394
3	Kebersihan	200	2.100.200	Kebersihan	150	1.575.150	525.050	13.126	105.010	525.050	643.186	-	118.136
4	Jib Crane	-	-	Jib Crane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Kontribusi Alat	150	1.575.150	Hopper	-	-	1.575.150	39.379	78.758	393.788	511.924	-	1.063.226
	Total	12.554	131.829.554		7.574	79.534.574	52.294.980	1.307.375	6.591.478	32.957.389	40.856.241	11.438.739	
	Persentase Margin						40%					8,68%	

KAPAL : MV NORD PLUTO
CARGO : SOYA BEAN MEAL
VOLUME : 18.429

NO	PENDAPATAN			BIAYA I			MARGIN I	KONSESI	REVENUE SHARING		BIAYA II	MARGIN PTP	KETERANGAN
	URAIAN	TARIF	PENDAPATAN	URAIAN	TARIF BIAYA	BIAYA			SPMT	REGIONAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								$(4-7) \times 2,5\%$	$5\% \times 4$	$25\% \times 4$	$(9+10+11)$	$(8-12)$	
1	Stevedoring	21.285	392.261.265	KSMU	18.755	345.635.895	46.625.370	1.165.634	19.613.063	98.065.316	118.844.014	-	72.218.644
2	Jasa Dermaga	2.250	41.465.250	Jasa Dermaga	-	-	41.465.250	1.036.631	2.073.263	10.366.313	13.476.206	-	27.989.044
3	Kebersihan	200	3.685.800	Kebersihan	150	2.764.350	921.450	23.036	184.290	921.450	1.128.776	-	207.326
4	Jib Crane	16.000	294.864.000	Jib Crane	-	-	294.864.000	7.371.600	14.743.200	73.716.000	95.830.800	-	199.033.200
5	Hopper	3.000	55.287.000	Hopper	2.250	41.465.250	13.821.750	345.544	-	-	345.544	-	Di luar BASO
	Total	42.735	787.563.315		21.155	389.865.495	397.697.820	9.942.446	36.613.816	183.069.079	229.625.340	168.072.480	
	Persentase Margin						50,50%					21,34%	

KAPAL : MV ARTEMIS BULKER (DERMAGA TBL)
CARGO : SOYA BEAN MEAL
VOLUME : 30.802

NO	PENDAPATAN			BIAYA I			MARGIN I	KONSESI	REVENUE SHARING		BIAYA II	MARGIN PTP	KETERANGAN
	URAIAN	TARIF	PENDAPATAN	URAIAN	TARIF BIAYA	BIAYA			SPMT	REGIONAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								$(4-7) \times 2,5\%$	$5\% \times 4$	$25\% \times 4$	$(9+10+11)$	$(8-12)$	
1	Stevedoring	23.285	717.224.570	KSMU	21.055	648.536.110	68.688.460	1.717.212	-	-	1.717.212	66.971.249	Di Luar BASO
2	Jasa Dermaga	2.250	69.304.500	Jasa Dermaga	2.250	69.304.500	-	1.732.613	-	-	-	-	Hak TBL
3	Kebersihan	200	6.160.400	Kebersihan	150	4.620.300	1.540.100	38.503	-	-	-	-	Hak TBL
4	Jib Crane	-	-	Jib Crane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Hopper	3.000	92.406.000	Hopper	2.250	69.304.500	23.101.500	577.538	-	-	-	-	Hak TBL
	Total	28.735	885.095.470		25.705	791.765.410	93.330.060	4.065.864	-	-	1.717.212	66.971.249	
	Persentase Margin						11%					7,57%	

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

3. Hasil Kerja Sama dengan PT Lintas Nusantara Prima belum Optimal

Kondisi

KAPAL : MV LBC ENERGY
CARGO : SOYA BEAN MEAL
VOLUME : 18.273

NO	PENDAPATAN			BIAYA I			MARGIN I	KONSESI	REVENUE SHARING		BIAYA II	MARGIN PTP	KETERANGAN
	URAIAN	TARIF	PENDAPATAN	URAIAN	TARIF BIAYA	BIAYA			SPMT	REGIONAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4-7) x 2,5%	10 5 % x 4	11 25 % x 4	12 (9+10+11)	13 (8 - 12)	14
1	Stevedoring	21.285	388.940.805	KSMU	18.755	342.710.115	46.230.690	1.155.767	19.447.040	97.235.201	117.838.009	-	71.607.319
2	Jasa Dermaga	2.250	41.114.250	Jasa Dermaga	-	-	41.114.250	1.027.856	2.055.713	10.278.563	13.362.131	-	27.752.119
3	Kebersihan	200	3.654.600	Kebersihan	150	2.740.950	913.650	22.841	182.730	913.650	1.119.221	-	205.571
4	Jib Crane	16.000	292.368.000	Jib Crane	-	-	292.368.000	7.309.200	14.618.400	73.092.000	95.019.600	-	197.348.400
5	Hopper	3.000	54.819.000	Hopper	2.250	41.114.250	13.704.750	342.619	-	-	342.619	-	13.362.131
	Total	42.735	780.896.655		21.155	386.565.315	394.331.340	9.858.284	36.303.883	181.519.414	227.681.580	-	166.649.760
	Persentase Margin						50,50%					21,34%	

KAPAL : MVSARONIC CHAMPION
CARGO : SOYA BEAN MEAL
VOLUME : 20.182

NO	PENDAPATAN			BIAYA I			MARGIN I	KONSESI	REVENUE SHARING		BIAYA II	MARGIN PTP	KETERANGAN
	URAIAN	TARIF	PENDAPATAN	URAIAN	TARIF BIAYA	BIAYA			SPMT	REGIONAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4-7) x 2,5%	10 5 % x 4	11 25 % x 4	12 (9+10+11)	13 (8 - 12)	14
1	Stevedoring	21.285	429.573.870	KSMU	18.755	378.513.410	51.060.460	1.276.512	21.478.694	107.393.468	130.148.673	-	79.088.213
2	Jasa Dermaga	2.250	45.409.500	Jasa Dermaga	-	-	45.409.500	1.135.238	2.270.475	11.352.375	14.758.088	-	30.651.413
3	Kebersihan	200	4.036.400	Kebersihan	150	3.027.300	1.009.100	25.228	201.820	1.009.100	1.236.148	-	227.048
4	Jib Crane	16.000	322.912.000	Jib Crane	-	-	322.912.000	8.072.800	16.145.600	80.728.000	104.946.400	-	217.965.600
5	Hopper	3.000	60.546.000	Hopper	2.250	45.409.500	15.136.500	378.413	-	-	378.413	-	14.758.088
	Total	42.735	862.477.770		21.155	426.950.210	435.527.560	10.888.189	40.096.589	200.482.943	251.467.720	-	184.059.840
	Persentase Margin						50,50%					21,34%	

KAPAL : MV AENEAS
CARGO : SOYA BEAN MEAL
VOLUME : 21.824

NO	PENDAPATAN			BIAYA I			MARGIN I	KONSESI	REVENUE SHARING		BIAYA II	MARGIN PTP	KETERANGAN
	URAIAN	TARIF	PENDAPATAN	URAIAN	TARIF BIAYA	BIAYA			SPMT	REGIONAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4-7) x 2,5%	10 5 % x 4	11 25 % x 4	12 (9+10+11)	13 (8 - 12)	14
1	Stevedoring	21.285	464.523.840	KSMU	18.755	409.309.120	55.214.720	1.380.368	23.226.192	116.130.960	140.737.520	-	85.522.800
2	Jasa Dermaga	2.250	49.104.000	Jasa Dermaga	-	-	49.104.000	1.227.600	2.455.200	12.276.000	15.958.800	-	33.145.200
3	Kebersihan	200	4.364.800	Kebersihan	150	3.273.600	1.091.200	27.280	218.240	1.091.200	1.336.720	-	245.520
4	Jib Crane	16.000	349.184.000	Jib Crane	-	-	349.184.000	8.729.600	17.459.200	87.296.000	113.484.800	-	235.699.200
5	Hopper	3.000	65.472.000	Hopper	2.250	49.104.000	16.368.000	409.200	-	-	409.200	-	15.958.800
	Total	42.735	932.648.640		21.155	461.686.720	470.961.920	11.774.048	43.358.832	216.794.160	271.927.040	-	199.034.880
	Persentase Margin						50,50%					21,34%	

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

3. Hasil Kerja Sama dengan PT Lintas Nusantara Prima belum Optimal

Kondisi

KAPAL : MV SAMBONG HERA
CARGO : MOLLASES
VOLUME : 10.500

NO	PENDAPATAN			BIAYA I			MARGIN I	KONSESI	REVENUE SHARING		BIAYA II	MARGIN PTP	KETERANGAN	
	URAIAN	TARIF	PENDAPATAN	URAIAN	TARIF BIAYA	BIAYA			SPMT	REGIONAL				
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4-7) x 2,5%	10 5 % x 4	11 25 % x 4	12 (9+10+11)	13 (8 - 12)	14	
1	Stevedoring	9.954	104.517.000	KSMU	7.424	77.952.000	26.565.000	664.125	5.225.850	26.129.250	32.019.225	-	5.454.225	
2	Jasa Dermaga	2.250	23.625.000	Jasa Dermaga	-	-	23.625.000	590.625	1.181.250	5.906.250	7.678.125	-	15.946.875	
3	Kebersihan	200	2.100.000	Kebersihan	150	1.575.000	525.000	13.125	105.000	525.000	643.125	-	118.125	
4	Jib Crane	-	-	Jib Crane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Kontribusi Alat	150	1.575.000	Hopper	-	-	1.575.000	39.375	78.750	393.750	511.875	-	1.063.125	
Total		12.554	131.817.000		7.574	79.527.000	52.290.000	1.307.250	6.590.850	32.954.250	40.852.350	-	11.437.650	
Persentase Margin							40%					8,68%		

KAPAL : MV GEMINI CONFIDENCE (DERMAGA TBL)
CARGO : SOYA BEAN MEAL
VOLUME : 26.239

NO	PENDAPATAN			BIAYA I			MARGIN I	KONSESI	REVENUE SHARING		BIAYA II	MARGIN PTP	KETERANGAN
	URAIAN	TARIF	PENDAPATAN	URAIAN	TARIF BIAYA	BIAYA			SPMT	REGIONAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4-7) x 2,5%	10 5 % x 4	11 25 % x 4	12 (9+10+11)	13 (8 - 12)	14
1	Stevedoring	23.285	610.975.115	KSMU	21.055	552.462.145	58.512.970	1.462.824	-	-	1.462.824	57.050.146	Di Luar BASO
2	Jasa Dermaga	2.250	59.037.750	Jasa Dermaga	2.250	59.037.750	-	1.475.944	-	-	-	-	Hak TBL
3	Kebersihan	200	5.247.800	Kebersihan	150	3.935.850	1.311.950	32.799	-	-	-	-	Hak TBL
4	Jib Crane	-	-	Jib Crane	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Hopper	3.000	78.717.000	Hopper	2.250	59.037.750	19.679.250	491.981	-	-	-	-	Hak TBL
Total		28.735	753.977.665		25.705	674.473.495	79.504.170	3.463.548	-	-	1.462.824	57.050.146	
Persentase Margin							11%					7,57%	

Dari tabel-tabel yang berkaitan dengan perhitungan margin per kapal di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Meskipun margin akhir PTP secara keseluruhan dari masing-masing kegiatan kapal memperoleh margin positif atau laba, namun untuk komponen *Stevedoring*, PTP memperoleh margin minus (negatif). Margin untuk komponen *stevedoring* yang bernilai positif hanya terdapat pada kegiatan Kapal MV Artemis Bulker dan MV Gemini Confidence, karena kegiatan bongkar muat kedua kapal tersebut dilakukan di dermaga TBL yang berada diluar area/aset yang dimuat dalam Berita Acara Serah Operasi (BASO), sehingga tidak dikenakan kewajiban/beban *revenue sharing*.

3. Hasil Kerja Sama dengan PT Lintas Nusantara Prima belum Optimal

Kondisi

Komponen pendapatan *stevedoring* yang memperoleh margin negatif tersebut disebabkan oleh tingginya biaya/beban KSMU yaitu berupa beban penggunaan buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), sehingga margin dari pendapatan bruto setelah dikurangi dengan biaya tersebut hanya tersisa sebesar 12%. Selanjutnya, sisa *margin* sebesar 12% tersebut masih dikurangi lagi dengan (i) biaya konsesi yaitu sebesar $2,5\% \times (\text{pendapatan bruto dikurangi beban TKBM})$, dan (ii) beban *revenue sharing* yang menjadi hak SPMT dan Pelindo Regional 2 Panjang yaitu sebesar $30\% \times \text{pendapatan bruto}$, sehingga *margin* akhir yang diperoleh PTP dari komponen *stevedoring* menjadi minus/negatif.

- 2) Dengan pola kerja sama ini, meskipun terjadi peningkatan atas pendapatan bruto untuk komponen *stevedoring*, namun di sisi lain terjadi juga peningkatann beban penggunaan buruh/TKBM yang dibayarkan oleh PTP kepada PT LNP, yang mengakibatkan adanya arus kas keluar uang terlebih dahulu, sebelum arus kas masuk pendapatan diperoleh. Secara *cashflow*, seharusnya arus kas keluar untuk pembayaran beban TKBM tersebut tidak perlu dilakukan sehingga tidak mengganggu *cashflow*, mengingat PT LNP melaksanakan *handling* bongkar muat atas *cargo* miliknya sendiri, yang juga akan ditagih kembali sebagai bagian dari pendapatan PTP. Untuk kegiatan bongkar muat tahun 2022, tagihan yang sudah disampaikan PT LNP untuk pembayaran beban ini adalah sebesar Rp4.791.057.291,00 (termasuk PPN). Jumlah yang telah dibayar Cabang Panjang adalah sebesar Rp4.083.165.601,00 (jumlah tagihan dikurangi dengan PPh 23). Sedangkan untuk tagihan yang disampaikan PT LNP pada tanggal 2 Agustus 2022 sebesar Rp632.768.755,00 belum dibayar Cabang Panjang.
- 3) Terdapat margin akhir yang minus/negatif untuk komponen kebersihan. Hal ini disebabkan adanya biaya yang dikeluarkan sebesar Rp150,00 per ton dari pendapatan sebesar Rp200,00 per ton. Selanjutnya margin sebesar Rp50,00 per ton tersebut dikurangi lagi dengan beban konsesi sebesar 2,5% dan beban *revenue sharing* sebesar 30% dari pendapatan bruto kebersihan sebesar Rp200,00 per ton. Biaya kebersihan sebesar Rp150,00 per ton tersebut dikeluarkan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor: UM.339/22/11/2/OPS.PJG-PTP-21 tanggal 22 November 2021 antara PT PTP Cabang Panjang dengan PT Mega Arlis Makmur tentang Pekerjaan Kebersihan di dermaga pelabuhan Panjang Terhadap Cargo PT Bongkar Muat Lintas Nusantara Prima. Sepanjang tahun 2022 biaya kebersihan yang telah dibayarkan atas 10 (sepuluh) tagihan yang juga didukung dengan dokumentasi pekerjaan adalah sebesar Rp30.373.083,00. Berdasarkan penjelasan yang diperoleh dari Deputy Manager Teknik dan Operasi bahwa pekerjaan kebersihan tersebut dilakukan oleh pihak PT Mega Arlis Makmur (PT MAM) khususnya untuk kegiatan bongkar muat atas cargo PT LNP.

Seharusnya biaya kebersihan sebesar Rp150,00 per ton tersebut bisa dihemat, karena disisi lain Cabang Panjang telah memiliki juga kerja sama dengan PT Kekar Insan Sejahtera (PT KIS) yang dituangkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: PR.102/19/1/1/PJG.PTP-22 tanggal 19 Januari 2022 tentang Pekerjaan Kebersihan Daerah Lingkungan Kerja Area terminal Curah Kering dan Terminal *Multipurpose* di pelabuhan Panjang Periode 1 Januari s.d. 31 Agustus 2022. Dalam SPK tersebut antara lain diatur ruang lingkup pekerjaan kebersihan meliputi Terminal Curah Kering dan Terminal *Multipurpose*. Dalam kerja sama ini, nilai pekerjaan dihitung secara lumpsum dengan jumlah yang sama untuk setiap bulannya.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

3. Hasil Kerja Sama dengan PT Lintas Nusantara Prima belum Optimal

Kondisi

- d. Jika perhitungan margin untuk pola kerja sama dengan PT LNP tersebut disimulasikan dengan cara membagi/sharing biaya KSMU/TKBM secara proporsional kepada SPMT dan Pelindo Regional 2 Panjang (pada komponen *stevedoring*), dan juga dengan mengurangi biaya kebersihan sebesar Rp150,00/ton yang tumpang tindih, maka didapatkan perbandingan nilai margin sebagaimana disajikan pada tabel-tabel berikut (perbandingan dilakukan secara sampel atas 2 kegiatan kapal).

KAPAL : MV PAC ACHERNAR (Eksisting)
 CARGO : SOYA BEAN MEAL
 VOLUME : 27.459

NO	PENDAPATAN			BIAYA I			MARGIN I	KONSESI	REVENUE SHARING		BIAYA II	MARGIN PTP	KETERANGAN
	URAIAN	TARIF	PENDAPATAN	URAIAN	TARIF BIAYA	BIAYA							
									SPMT	REGIONAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4-7) x 2,5%	10 5 % x 4	11 25 % x 4	12 (9+10+11)	13 (8 - 12)	14
1	Stevedoring	21.285	584.464.815	KSMU	18.755	514.993.545	69.471.270	1.736.782	29.223.241	146.116.204	177.076.226	- 107.604.956	
2	Jasa Dermaga	2.250	61.782.750	Jasa Dermaga	-	-	61.782.750	1.544.569	3.089.138	15.445.688	20.079.394	41.703.356	
3	Kebersihan	200	5.491.800	Kebersihan	150	4.118.850	1.372.950	34.324	274.590	1.372.950	1.681.864	- 308.914	
4	Jib Crane	16.000	439.344.000	Jib Crane	-	-	439.344.000	10.983.600	21.967.200	109.836.000	142.786.800	296.557.200	
5	Hopper	3.000	82.377.000	Hopper	2.250	61.782.750	20.594.250	514.856	-	-	514.856	20.079.394	Di luar BASO
Total		42.735	1.173.460.365		21.155	580.895.145	592.565.220	14.814.131	54.554.168	272.770.841	342.139.140	250.426.080	

KAPAL : MV PAC ACHERNAR (Simulasi)
 CARGO : SOYA BEAN MEAL
 VOLUME : 27.459

NO	PENDAPATAN			BIAYA I			MARGIN I	KONSESI	REVENUE SHARING		BIAYA II	MARGIN PTP	KETERANGAN
	URAIAN	TARIF	PENDAPATAN	URAIAN	TARIF BIAYA	BIAYA			SETELAH DIKURANGI SHARING BIAYA KSMU/TKBM				
									SPMT	REGIONAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4-7) x 2,5%	10 (5%x 4) - (5%x7)	11 (25%x 4) - (25%x7)	12 (9+10+11)	13 (8 - 12)	14
1	Stevedoring	21.285	584.464.815	KSMU	18.755	514.993.545	69.471.270	1.736.782	3.473.564	17.367.818	22.578.163	46.893.107	
2	Jasa Dermaga	2.250	61.782.750	Jasa Dermaga	-	-	61.782.750	1.544.569	3.089.138	15.445.688	20.079.394	41.703.356	
3	Kebersihan	200	5.491.800	Kebersihan	-	-	5.491.800	137.295	274.590	1.372.950	1.784.835	3.706.965	
4	Jib Crane	16.000	439.344.000	Jib Crane	-	-	439.344.000	10.983.600	21.967.200	109.836.000	142.786.800	296.557.200	
5	Hopper	3.000	82.377.000	Hopper	2.250	61.782.750	20.594.250	514.856	-	-	514.856	20.079.394	Di luar BASO
	Total	42.735	1.173.460.365		21.005	576.776.295	596.684.070	14.917.102	28.804.491	144.022.455	187.744.048	408.940.022	

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

3. Hasil Kerja Sama dengan PT Lintas Nusantara Prima belum Optimal

Kondisi

KAPAL : MV HAMPTON SKY (Eksisting)
CARGO : SOYA BEAN MEAL
VOLUME : 13.053

NO	PENDAPATAN			BIAYA I			MARGIN I	KONSESI	REVENUE SHARING		BIAYA II	MARGIN PTP	KETERANGAN
	URAIAN	TARIF	PENDAPATAN	URAIAN	TARIF BIAYA	BIAYA			SPMT	REGIONAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								$(4-7) \times 2,5\%$	$5\% \times 4$	$25\% \times 4$	$(9+10+11)$	$(8-12)$	
1	Stevedoring	21.285	277.833.105	KSMU	18.755	244.809.015	33.024.090	825.602	13.891.655	69.458.276	84.175.534	-	51.151.444
2	Jasa Dermaga	2.250	29.369.250	Jasa Dermaga	-	-	29.369.250	734.231	1.468.463	7.342.313	9.545.006	-	19.824.244
3	Kebersihan	200	2.610.600	Kebersihan	150	1.957.950	652.650	16.316	130.530	652.650	799.496	-	146.846
	KSMU Alat										-	-	
4	Jib Crane	16.000	208.848.000	Jib Crane	-	-	208.848.000	5.221.200	10.442.400	52.212.000	67.875.600	-	140.972.400
5	Hopper	3.000	39.159.000	Hopper	2.250	29.369.250	9.789.750	244.744	-	-	244.744	-	9.545.006
	Total	42.735	557.819.955		21.155	276.136.215	281.683.740	7.042.094	25.933.048	129.665.239	162.640.380	119.043.360	

KAPAL : MV HAMPTON SKY
CARGO : SOYA BEAN MEAL
VOLUME : 13.053

NO	PENDAPATAN			BIAYA I			MARGIN I	KONSESI	REVENUE SHARING SETELAH DIKURANGI SHARING BIAYA KSMU/TKBM		BIAYA II	MARGIN PTP	KETERANGAN
	URAIAN	TARIF	PENDAPATAN	URAIAN	TARIF BIAYA	BIAYA			SPMT	REGIONAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								$(4-7) \times 2,5\%$	$(5\% \times 4) - (5\% \times 7)$	$(25\% \times 4) - (25\% \times 7)$	$(9+10+11)$	$(8-12)$	
1	Stevedoring	21.285	277.833.105	KSMU	18.755	244.809.015	33.024.090	825.602	1.651.205	8.256.023	10.732.829	-	22.291.261
2	Jasa Dermaga	2.250	29.369.250	Jasa Dermaga	-	-	29.369.250	734.231	1.468.463	7.342.313	9.545.006	-	19.824.244
3	Kebersihan	200	2.610.600	Kebersihan	-	-	2.610.600	65.265	130.530	652.650	848.445	-	1.762.155
	KSMU Alat										-	-	
4	Jib Crane	16.000	208.848.000	Jib Crane	-	-	208.848.000	5.221.200	10.442.400	52.212.000	67.875.600	-	140.972.400
5	Hopper	3.000	39.159.000	Hopper	2.250	29.369.250	9.789.750	244.744	-	-	244.744	-	9.545.006
	Total	42.735	557.819.955		21.005	274.178.265	283.641.690	7.091.042	13.692.597	68.462.985	89.246.624	194.395.066	

Dari tabel-tabel perbandingan di atas terlihat bahwa dengan cara membagi/sharing biaya KSMU/TKBM secara proporsional kepada SPMT dan Pelindo Regional 2 Panjang (pada komponen *stevedoring*), pendapatan bruto tidak mengalami penurunan dan margin yang diperoleh PTP khususnya untuk komponen *stevedoring* tidak lagi bernilai minus/positif.

e. Kerja sama belum didukung dengan isi kesepakatan tertulis yang memadai

Pengujian atas kesepakatan tertulis yang melandasi kerja sama penanganan bongkar muat tersebut diketahui bahwa kerja sama tersebut diikat dengan kesepakatan dalam bentuk berita-berita acara kesepakatan. Pengujian lebih lanjut atas isi berita-berita acara tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat ketentuan-ketentuan yang seharusnya diatur, namun belum dimuat dalam berita-berita acara tersebut, antara lain definisi/pengertian umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup yang lebih jelas, jangka waktu kerja sama, kewajiban dan hak masing-masing pihak yang lebih rinci, identitas rekening bank yang menjadi tempat penampungan pembayaran, ketentuan terkait dengan kerahasiaan, *force majeure* (keadaan kahar), dan hal-hal lain yang dirasa perlu untuk diatur. Selain itu, dalam hal aspek legal formil, jika melihat kepada ketentuan-ketentuan yang seharusnya diatur namun belum dimuat dalam kesepakatan yang telah ada tersebut, maka seharusnya kesepakatan/perikatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian.

3. Hasil Kerja Sama dengan PT Lintas Nusantara Prima belum Optimal

Kriteria

- a. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/30/6/1/PTP-20 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pedoman Penyusunan Kesepakatan Tertulis Antara Perusahaan Dengan Mitra di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Pasal 4 ayat (3) yang menyatakan bahwa Perjanjian/Kontrak memiliki sifat dan karakteristik antara lain:
 - 1) Telah adanya hubungan hukum yang mengikat antara Perusahaan dengan Pihak Mitra;
 - 2) Mengatur hak dan kewajiban serta hal lain secara rinci dan detail, dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dari pihak lain dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut dan sebaliknya;
 - 3) Adanya sanksi hukum.
- b. Peraturan Direksi Nomor HK.55/30/12/1/PTP-20 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok:
 - 1) Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa Kerja Sama adalah perjanjian, kesepakatan, dan perikatan hukum antara Perusahaan dan Mitra dengan berdasarkan kepada prinsip saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama, baik yang dilaksanakan di dalam lingkungan Perusahaan maupun di luar lingkungan Perusahaan.
 - 2) Pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa Pendapatan Perusahaan sebagaimana diatur dalam pasal ini dilaksanakan berdasarkan kesepakatan yang saling menguntungkan antara Perusahaan dan Mitra dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Direksi ini dan ketentuan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai tarif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3) Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan dan Mitra dibuat berdasarkan prinsip kehati-hatian dan bertujuan untuk melindungi kepentingan Perusahaan.

Root Cause

- a. Kekurangcermatan dalam merumuskan pola kerja sama yang akan disepakati dengan pihak mitra, sehingga margin/laba yang diperoleh belum optimal;
- b. Kurang optimalnya penagihan kepada PT LNP atas piutang yang telah melewati jangka waktu pembayaran yang telah disepakati;
- c. Belum diterapkannya prinsip efisiensi secara memadai, khususnya yang berhubungan dengan pekerjaan kebersihan;
- d. Penyusunan kesepakatan bongkar muat belum sepenuhnya berpedoman kepada Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/30/6/1/PTP-20 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pedoman Penyusunan Kesepakatan Tertulis Antara Perusahaan Dengan Mitra di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

3. Hasil Kerja Sama dengan PT Lintas Nusantara Prima belum Optimal

Implikasi Bisnis

- a. Margin laba yang diperoleh Perusahaan dari kerja sama dengan PT LNP belum optimal;
- b. Tertundanya penerimaan kas atas piutang yang belum dibayar oleh PT LNP, yang telah melewati batas waktu pembayaran minimal sebesar Rp955.218.473,00;
- c. Pemborosan atas pengeluaran biaya kebersihan minimal sebesar Rp30.373.083,00;
- d. Perusahaan berpotensi mengalami kesulitan dalam penyelesaian jika terjadi permasalahan hukum karena butir-butir kesepakatan yang belum dimuat secara komprehensif dalam BA Kesepakatan.

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<ul style="list-style-type: none"> a. Berkoordinasi dengan Direktorat Komersial Kantor Pusat PTP dengan membuat opsi-opsi perhitungan pola kerja sama dengan Mitra agar Cabang Panjang dapat memperoleh margin laba yang lebih optimal; b. Melakukan penagihan kepada PT LNP untuk segera menyelesaikan kewajiban atas pelunasan piutang Perusahaan; c. Mereview kerja sama pekerjaan kebersihan dengan PT MAM untuk efisiensi biaya kebersihan; d. Melakukan negosiasi dengan Pihak PT LNP untuk menambahkan butir-butir kesepakatan yang lebih komprehensif dan dituangkan dalam bentuk perjanjian. 	<p>Branch Manager Cabang Panjang 10 November 2022</p>	2

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

4. Penggunaan Bangunan Kantor oleh PT Intisentosa Alambahtera

Kondisi

Pada bulan September 2021 PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) menyepakati kerja sama dengan PT Intisentosa Alambahtera (PT ISAB). Kesepakatan kerja sama tersebut dituangkan dalam 3 (tiga) perjanjian, yang terdiri dari:

- Perjanjian Nomor: HK.55/30/9/2/PTP-21 & Nomor 062A/Dir_IA/LPG/IX/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Kerja Sama Optimalisasi Penanganan Kargo *Multipurpose* dan Aset Tetap di Dermaga F Pelabuhan Panjang;
- Perjanjian Nomor: HK.55/30/9/3/PTP-21 & Nomor 062B/Dir_IA/LPG/IX/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Kerja Sama Pengelolaan Tanah HPL dan Fasilitas Penunjang di Pelabuhan Panjang;
- Perjanjian Nomor: HK.55/30/9/4/PTP-21 & Nomor 062C/Dir_IA/LPG/IX/2021 tanggal 30 September 2021 tentang *Service Level Agreement* (SLA), *Service Level Guarantee* (SLG), dan Tarif dalam kerja sama Penyediaan dan Pelayanan Jasa Bongkar Muat Kargo *Multipurpose* di Lingkungan Pelabuhan Panjang.

Berdasarkan revidi atas butir-butir yang disepakati dalam perjanjian-perjanjian tersebut diketahui bahwa dalam Perjanjian Nomor: HK.55/30/9/3/PTP-21 & Nomor 062B/Dir_IA/LPG/IX/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Kerja Sama Pengelolaan Tanah HPL dan Fasilitas Penunjang di Pelabuhan Panjang diantaranya, pada Pasal 7 ayat (3) huruf i memuat ketentuan yang menyatakan Kewajiban Pihak Kedua (PT ISAB) membayar biaya penggunaan bangunan kantor yang digunakan Pihak Kedua apabila kewajiban Komponen Tanah ditanggguhkan oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) Perjanjian ini.

Adapun Pasal 5 ayat (8) dimaksud memuat ketentuan yang antara lain menyatakan bahwa selama Jangka Waktu Perjanjian, Pihak Kedua berhak menangguhkan kewajiban pembayaran Komponen Tanah sebesar Rp7.000,00/ton (tujuh ribu Rupiah per ton) dan oleh karenanya Pihak Kedua hanya berkewajiban membayar tarif *handling* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian SLA, SLG dan Tarif, sampai dengan ditandatanganinya *addendum* perjanjian Induk mengenai Penyesuaian jangka waktu Perjanjian Induk dan Perjanjian ini menjadi 20 (dua puluh) tahun oleh Para Pihak sebagaimana juga diatur dalam pasal 6 ayat (2) Perjanjian ini.

Sementara itu, dalam perjanjian tersebut tidak diatur secara jelas terkait dengan besaran biaya yang akan dikenakan sehubungan dengan penggunaan bangunan kantor oleh PT ISAB.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Cabang Panjang, sampai dengan saat ini kewajiban pembayaran Komponen Tanah sebesar Rp7.000/ton tersebut masih ditanggguhkan oleh PT ISAB dan belum ada negosiasi dan/atau penagihan yang dilakukan atas penggunaan bangunan kantor oleh PT ISAB. Terkait dengan hal ini, Cabang Panjang akan melakukan pembicaraan/negosiasi dengan PT ISAB untuk menagihkan pembayaran penggunaan bangunan kantor tersebut.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

4. Penggunaan Bangunan Kantor oleh PT Intisentosa Alambahtera

Kondisi

Bangunan kantor tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Kriteria

Perjanjian Nomor: HK.55/30/9/3/PTP-21 & Nomor 062B/Dir_IA/LPG/IX/2021 tanggal 30 September 2021 tentang kerja sama Pengelolaan Tanah HPL dan Fasilitas Penunjang di Pelabuhan Panjang:

- a. Pasal 5 ayat (8), menyatakan bahwa selama Jangka Waktu Perjanjian, Pihak Kedua berhak menangguhkan kewajiban pembayaran Komponen Tanah sebesar Rp7.000,00/ton (tujuh ribu Rupiah per ton) dan oleh karenanya Pihak Kedua hanya berkewajiban membayar tarif *handling* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian SLA, SLG dan Tarif, sampai dengan ditandatanganinya *addendum* perjanjian Induk mengenai Penyesuaian jangka waktu Perjanjian Induk dan Perjanjian ini menjadi 20 (dua puluh) tahun oleh Para Pihak sebagaimana juga diatur dalam pasal 6 ayat (2) Perjanjian ini.
- b. Pasal 7 ayat (3) huruf i, menyatakan Kewajiban Pihak Kedua membayar biaya penggunaan bangunan kantor yang digunakan pihak Kedua apabila kewajiban Komponen Tanah ditangguhkan oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) Perjanjian ini.

Root Cause

Belum dilakukannya negosiasi dengan pihak PT ISAB terkait dengan pembayaran biaya penggunaan bangunan kantor yang digunakan PT ISAB, sehubungan dengan ditanggungkannya kewajiban Komponen Tanah oleh PT ISAB.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

43

4. Penggunaan Bangunan Kantor oleh PT Intisentosa Alambahtera

Implikasi Bisnis

Cabang Panjang belum memperoleh pendapatan yang berasal dari pembayaran biaya penggunaan bangunan kantor yang digunakan PT ISAB, sehubungan dengan ditangguhkannya kewajiban Komponen Tanah oleh PT ISAB.

Rekomendasi:

PIC Temuan
Audit/Batas Waktu

Prioritas

Segera melaksanakan koordinasi/negosiasi dengan pihak PT ISAB dalam rangka pembayaran biaya penggunaan bangunan kantor yang digunakan PT ISAB, sehubungan dengan kewajiban Komponen Tanah yang ditangguhkan oleh PT ISAB.

Branch Manager
Cabang Panjang
10 November 2022

2

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

5. Kerusakan GJC 02, Forklift Diesel 10 Ton, Hopper dan Grab GJC

Kondisi

Berdasarkan pemeriksaan data, keterangan dari petugas bagian Teknik dan kunjungan lapangan diperoleh informasi bahwa ada beberapa alat bongkar muat utama, alat pendukung dan alat bantu yang masuk dalam BASO namun mengalami kerusakan sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

NO.	JENIS ALAT	CODE	KETERANGAN
1	GANTRY JIB CRANE	02	Dalam Proses Perbaikan Penggantian Bearing Boom Rack & Balance dan Bearing Pinion Kerusakan sejak 14 Agustus 2022
2	FORKLIFT 10 TON	07	Dalam Proses retrofit body, electrical system dan hydraulic system Kerusakan body sejak Agustus 2021
3	HOPPER	01	Struktur Korosi, railing atas keropos, grating keropos, open-close system bocor
4	HOPPER	02	Struktur Korosi, railing atas keropos, grating keropos, open-close system bocor Sudah tidak dioperasikan sejak 2019
5	HOPPER	03	Struktur Korosi, railing atas keropos, grating keropos, open-close system bocor Sudah tidak dioperasikan sejak 2019
6	HOPPER	04	Struktur Korosi, railing atas keropos, grating keropos, open-close system bocor Sudah tidak dioperasikan sejak 2019
7	HOPPER	05	Struktur Korosi, grating keropos, railing atas keropos,udukan open-close system keropos
8	HOPPER	06	Struktur Korosi, grating keropos, railing atas keropos,udukan open-close system keropos

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

5. Kerusakan GJC 02, Forklift Diesel 10 Ton, Hopper dan Grab GJC

Kondisi

9	HOPPER	07	Struktur Korosi, grating keropos, railling atas keropos, dudukan open-close system keropos
10	HOPPER	08	Struktur Korosi, grating keropos, railling atas keropos, dudukan open-close system keropos
11	GRAB GJC	01	Tidak maksimal digunakan karena bucket grab bocor
12	GRAB GJC	02	Tidak maksimal digunakan karena bucket grab bocor
13	GRAB GJC	03	Tidak maksimal digunakan karena bucket grab bocor
14	GRAB GJC	04	Rusak berat, struktur rusak, lip bucket sobek, tidak bisa dilakukan retrofit
			Sudah tidak dioperasikan sejak 2020

Kondisi beberapa alat yang dioperasikan Cabang Panjang sampai dengan masa audit berakhir masih ada dalam keadaan rusak, sehingga tidak bisa dioperasikan secara optimal untuk melakukan kegiatan bongkar muat. GJC 02 mengalami kerusakan sejak tanggal 14 Agustus 2022, sampai sekarang masih dalam tahap pengecekan dan rekomendasi dari Tim JPPI area Panjang untuk dilakukan penggantian *Bearing Boom Rock and Balance* dan penggantian *Bearing Pinion*. Tim JPPI area Panjang masih berkoordinasi dengan JPPI Kantor Pusat terkait dengan waiting part GJC 02, berikutnya ada kerusakan *Forklift Diesel* 10 Ton sejak bulan Agustus 2021 dimana sekarang masih dalam tahap proses administrasi pengajuan *retrofit body, electrical system* dan *hydraulic system*. Berikutnya ada alat bantu berupa *Hopper* no 02, 03 dan 04 banyak yang keropos sehingga sudah tidak digunakan sejak tahun 2019. Untuk Grab GJC no 01 kondisinya bocor sedangkan *Grab* GJC no 04 rusak dan sudah tidak dioperasikan sejak tahun 2020.

Kriteria

- Berita Acara Serah Operasi Antara PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan PT. Pelindo Multi Terminal Nomor : KS.03/31/12/1/PGPR/PGLA/REG2-21 dan Nomor KS.01/31/12/2/PAPS/DISK/PLMT-21 tanggal 31 Desember 2021 tentang Serah Operasi Bisnis dan Pelayanan Terminal Multipurpose di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Kepada PT Pelindo Multi Terminal.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

5. Kerusakan GJC 02, Forklift Diesel 10 Ton, Hopper dan Grab GJC

Kriteria

- b. Berita Acara Nomor UM.339/2/6/14/PTP-22 tanggal 2 Juni 2022 perihal Selesai Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok Periode Tahun 2021-2022, yang diantaranya menyatakan bahwa setelah berakhirnya Surat Perjanjian Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok pada 31 Mei 2022, maka Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT PTP tetap dilaksanakan oleh PT JPPI dengan mengacu kepada nilai pekerjaan yang baru sesuai dengan nanti hasil kesepakatan kontrak;
- c. Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis (RKS Teknis) Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- d. Berita Acara Kerusakan & Rekomendasi Nomor : J.VI/29/5/GJC 02/C.PJG-JPPI-2022 Nama Pekerjaan : Penggantian *Bearing Boom Rock And Balance* dan Nomor : J.VI/29/7/GJC 02/C. PJG-2022 Nama Pekerjaan : Penggantian Bearing Pinion.

Root Cause

- a. Belum berkoordinasi dengan PT JPPI area Panjang dalam rangka pembuatan Berita Acara *waiting part* kerusakan alat GJC 02;
- b. Belum ada koordinasi lebih lanjut dengan Pelindo Regional 2 Panjang terkait dengan proses *Retrofit Body Forklift Diesel 10 Ton*;
- c. Belum ada evaluasi dan koordinasi dengan Direktorat Komersial Kantor Pusat dan/atau Pelindo Regional 2 Panjang terkait dengan alat-alat yang sudah lama tidak dioperasikan yaitu *Hopper 02, 03 dan 04*.

Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Tidak diketahui kapan waktu selesainya pekerjaan perbaikan atas alat GJC 02;
- b. Potensi waktu kerja bongkar muat menjadi lebih lama dari alokasi waktu yang dijadwalkan;
- c. Berpotensi terjadinya klaim dari Pengguna Jasa/pemilik barang.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

47

5. Kerusakan GJC 02, Forklift Diesel 10 Ton, Hopper dan Grab GJC

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<ul style="list-style-type: none">a. Berkoordinasi dengan PT JPPI area Panjang dalam rangka pembuatan berita acara <i>waiting part</i> untuk kerusakan alat GJC 02;b. Berkoordinasi dengan Pelindo Regional 2 Panjang untuk percepatan proses <i>Retrofit Body Forklit Diesel 10 Ton</i>;c. Membuat evaluasi dan berkoordinasi dengan Direktorat Komersial Kantor Pusat dan/atau Pelindo Regional 2 Panjang terkait dengan alat-alat yang sudah lama tidak dioperasikan yaitu <i>Hopper 02, 03 dan 04</i>, untuk diusulkan dikeluarkan dari lampiran aset pada BASO.	Branch Manager Cabang Panjang 31 Oktober 2022	1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

6. Surat Ijin Operator (SIO) yang Telah Habis Masa Berlakunya

Kondisi

Berdasarkan reviu data operator alat bongkar muat utama dan alat pendukung bongkar muat terdapat 2 (dua) personil yang masa berlaku SIO-nya telah berakhir sebagaimana tabel berikut :

No	Nama Pegawai	Status Pegawai	Jabatan	Masa Berlaku SIO
1	Ulil Azmi	Non Organik	Operator GLC/GJC	31 Maret 2022
2	Sukamto	Non Organik	Operator GLC/GJC	31 Maret 2022

Pada PT. PTP Cabang Panjang memiliki 28 (dua puluh delapan) operator yang terdiri dari 2 (dua) Pegawai Organik, 24 (dua puluh empat) Tenaga Non Organik (TNO) dan 2 (dua) Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) dengan komposisi 3 (tiga) orang sebagai operator *Forklift Diesel* (FD) dan 24 (dua puluh empat) orang sebagai operator GLC/GJC. Selanjutnya dari total 28 (dua puluh delapan) operator tersebut terdapat 2 (dua) orang yang masa berlaku SIO-nya telah berakhir sejak tanggal 31 Maret 2022 yaitu sdr Ulil Azmi dan sdr Sukamto (TNO).

Kriteria

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut pasal 140 ayat 4 “ Kewenangan personil Teknisi, Operator dan juru ikat (*rigger*) sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a, huruf b, dan huruf c harus dibuktikan dengan lisensi K3.”

Root Cause

PT. PTP Cabang Panjang belum melakukan pengurusan perpanjangan SIO bagi operator yang telah habis masa berlakunya.

6. Surat Ijin Operator (SIO) yang Telah Habis Masa Berlakunya

Implikasi Terhadap Bisnis

Berpotensi terjadinya permasalahan hukum apabila terjadi kecelakaan kerja dan/atau inspeksi mendadak oleh instansi yang berwenang karena 2 (dua) Operator tidak memiliki SIO yang masih berlaku.

Rekomendasi:

PIC Temuan
Audit/Batas Waktu

Prioritas

Segera mengurus/memproses pembuatan perpanjangan SIO bagi operator yang berstatus TNO yang telah berakhir masa berlaku SIO-nya.

Branch Manager
Cabang Panjang
31 Oktober 2022

1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

7. Bagi Hasil Kerja Sama Pengoperasian Hopper dengan PT Guda Artha Kencana Perlu Ditingkatkan

Kondisi

Berdasarkan revidi data dari Surat Perjanjian Nomor : PR. 102/II/II/1/ OPS. PJG.PTP-21 dan Nomor 40 /GAK-PJG/XI/2021 tanggal 15 November 2021 antara PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Panjang Dengan PT Guda Artha Kencana tentang Kerja Sama Pengoperasian Alat Non Mekanis di Pelabuhan Panjang, sebagaimana diatur dalam pasal 8 “Mekanisme Bagi Hasil”

- (1) PARA PIHAK sepakat Bagi Hasil atas pendapatan yang diperoleh dari pengoperasian alat non mekanis milik PIHAK KEDUA di Pelabuhan Panjang akan dibagi kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan dan persentase PIHAK PERTAMA sebesar 25% dan PIHAK KEDUA sebesar 75%;
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Bagi Hasil atas Pendapatan kerja sama Pengoperasian Alat non Mekanis di Pelabuhan Panjang dihitung dari pendapatan bruto;
- (3) Bahwa berdasarkan mekanisme bagi hasil yang telah disepakati di atas maka biaya kerja sama usaha yang harus dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp2.250 per ton (belum termasuk pajak-pajak yang berlaku);

Berdasarkan data produksi periode bulan November 2021 sampai dengan Agustus 2022 diketahui data sharing sebagai mana table berikut :

NO.	BULAN	PRODUKSI (TON)	REVENUE	SHARING PTP	SHARING PT. GAK
1	Nov-21	35.621	Rp106.863.000	Rp26.715.750	Rp80.147.250
2	Des-21	43.430	Rp130.290.000	Rp32.572.500	Rp97.717.500
3	Jan-22	14.878	Rp44.634.000	Rp11.158.500	Rp33.475.500
4	Feb-22	46.174	Rp138.522.000	Rp34.630.500	Rp103.891.500
5	Mar-22	33.913	Rp101.739.000	Rp25.434.750	Rp76.304.250
6	Apr-22	43.463	Rp130.389.000	Rp32.597.250	Rp97.791.750
7	Mei-22	59.762	Rp179.286.000	Rp44.821.500	Rp134.464.500
8	Jun-22	27.787	Rp83.361.000	Rp20.840.250	Rp62.520.750
9	Jul-22	29.926	Rp89.778.000	Rp22.444.500	Rp67.333.500
10	Agu-22	59.907	Rp179.721.000	Rp44.930.250	Rp134.790.750
		394.861	Rp1.184.583.000	Rp296.145.750	Rp888.437.250

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

7. Bagi Hasil Kerja Sama Pengoperasian Hopper dengan PT Guda Artha Kencana Perlu Ditingkatkan

Kondisi

Dari data tersebut di atas dapat disampaikan bahwa produksi bongkar *Soyabean/Soyabean mill* selama 10 bulan berjalan sejak mulai perjanjian sudah menangani sebanyak 394.861 ton (Tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh satu ribu ton) dengan pendapatan Rp1.184.583.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan bagi hasil untuk PT PTP sebesar Rp296.145.750,00 (dua ratus Sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk PT Guda Artha Kencana mendapat Rp888.437.250,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah). Dari perolehan pendapatan tersebut terlihat perbedaan yang cukup tinggi antara PT PTP dengan PT Guda Artha Kencana.

Selain itu, diketahui bahwa dalam pelaksanaan kerja sama tersebut mobilisasi dan demobilisasi alat pada setiap ada kegiatan bongkar dilakukan oleh PT PTP.

Jika dibandingkan dengan Cabang Banten dengan metode sewa *Hopper* murni sebesar Rp2.500/ton namun sudah termasuk didalamnya SDM, kebersihan, mobilisasi dan demobilisasi ditanggung oleh pemilik *Hopper*, sedangkan tarif yang disewakan ke pengguna jasa sebesar Rp3.500/ton untuk yang elektrik dan Rp3.000/ton untuk yang non elektrik.

Kriteria

Surat Perjanjian Nomor : PR.102/II/II/1/OPS. PJG.PTP-21 dan Nomor 40/GAK-PJG/XI/2021 tanggal 15 November 2021 antara PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Panjang Dengan PT Guda Artha Kencana tentang Kerja Sama Pengoperasian Alat Non Mekanis Di Pelabuhan Panjang

Root Cause

Kesepakatan persentase bagi hasil kerja sama pengoperasian Hopper dengan PT Guda Artha Kencana tidak didukung dengan analisis/kajian yang memadai.

Implikasi Terhadap Bisnis

PT PTP belum memperoleh margin laba yang optimal dari kerja sama pengoperasian alat non mekanis dengan PT Guda Artha Kencana.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

52

7. Bagi Hasil Kerja Sama Pengoperasian Hopper dengan PT Guda Artha Kencana Perlu Ditingkatkan

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
Melakukan negosiasi ulang untuk menaikkan persentase perbandingan bagi hasil dengan PT Guda Artha Kencana.	Branch Manager Cabang Panjang 31 Oktober 2022	1
Komentar Auditi: Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.		

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

8. Meningkatnya Biaya Perlengkapan PTP Cabang Panjang

Kondisi

Dari data realisasi biaya perlengkapan Januari sampai dengan Agustus tahun 2022 dibandingkan dengan RKAP dan *Year on year* pada periode yang sama tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
a.	RKAP	Rp. 1.478.419.528
b.	Realisasi s.d Aug 2022	Rp. 1.881.499.958
c	Realisasi s.d Aug 2021	Rp. 1.652.964.820
c	Selisih Year on Year	Rp. 228.535.138

Dengan rincian data biaya perlengkapan perbulan Januari sampai dengan Agustus sebagai berikut :

Bulan	2021	2022	Selisih
Jan	-	46,243,750	46,243,750
Feb	345,690,410	148,131,456	(197,558,954)
Mar	198,111,400	245,442,444	47,331,044
Apr	313,445,150	363,575,844	50,130,694
May	164,307,200	329,601,474	165,294,274
Jun	73,744,000	84,507,764	10,763,764
Jul	60,217,800	363,625,600	303,407,800
Aug	497,448,860	300,371,626	(197,077,234)
	1,652,964,820	1,881,499,958	228,535,138

Hasil wawancara dengan petugas operasional maupun administrasi, bahwa sampai dengan masa audit belum pernah dibuatkan daftar pembelian/pengadaan barang dan jasa sehingga tidak dapat dijelaskan rincian biaya peralatan. Admisnistator hanya menyimpan bukti kwitansi dan memo permintaan yang kurang lengkap. Hal ini menyebabkan tidak adanya evaluasi dan monitoring pengadaan/pembelian untuk keperluan pelayanan operasi khususnya untuk pembelian/pengadaan maupun perbaikan alat-alat bantu bongkar muat.

8. Meningkatnya Biaya Perlengkapan PTP Cabang Panjang

Kondisi

Alat-alat bantu bongkar muat yang sering dibeli atau diperbaiki antara lain jala-jala muat, bagor (karung), skop, *packing teflon* dan perbaikan plat untuk alas muatan di dermaga,

Petugas yang bertanggung jawab terhadap peralatan non mekanis juga tidak mencatat keluar-masuknya peralatan sehingga tidak adanya *control* terhadap peralatannya.

Kriteria

- a. Laporan Keuangan tahun 2021 terkait biaya bahan/perlengkapan;
- b. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan RKAP 2022.

Root Cause

- a. Tidak adanya daftar pengeluaran biaya pembelian dan perbaikan perlengkapan yang dapat dijadikan dasar evaluasi dan monitoring biaya;
- b. Tidak adanya daftar inventori/persediaan peralatan non mekanis dan pergerakannya (laporan permintaan dan pengeluaran);
- c. Belum adanya sosialisasi terkait penggunaan alat bantu non mekanis sehingga tidak cepat rusak.

Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Tidak adanya kontrol terhadap persediaan dan perawatan alat mekanis dapat menyebabkan tingginya biaya peralatan non mekanis terutama jala-jala, bangor/karung, skop dan lainnya;
- b. Kurangnya perhatian terhadap penggunaan alat bantu mekanis dapat menyebabkan kerusakan pada alat bantu sehingga biaya pengadaan dan atau perbaikan menjadi meningkat.

8. Meningkatnya Biaya Perlengkapan PTP Cabang Panjang

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<ul style="list-style-type: none">a. Membuat daftar pembelanjaan barang dan jasa untuk perlengkapan/bahan peralatan yang dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan monitoring serta pengendalian biaya;b. Membuat prosedur pergerakan peralatan non mekanis sehingga dapat mengontrol dan mengevaluasi perlengkapan khususnya peralatan bongkar muat non mekanis;c. Memberikan sosialisasi kepada tenaga operasional untuk memperhatikan penggunaan peralatan non mekanis agar tidak cepat rusak.	Branch Manager Cabang Panjang 10 November 2022	2
Komentar Auditi: Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.		

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

9. Pelayanan Bongkar Muat Belum 24/7

Kondisi

Tabel di bawah ini diambil dari data *idle time* pada *Survival Kit* kinerja bongkar muat B/M yang terjadi di bulan Juli dan Agustus 2022. Data di *filter* hanya untuk 3 faktor penyebab *idle time* tertinggi sebagai berikut

DATA IDLE TIME SIGNIFICANT PERIODE JULI-AGUSTUS 2022

KAPAL	ALAT B/M	WEATHER	STOP GUDANG	WAITING TRUCK
KM. BAHARI 12	Ship Crane	1.2	27.96	6.26
BG. MARINE POWER 3061	Excavator	0	14.33	7.5
MV. EASTERN EDELWEISS	Gantry Crane	6.83	1.41	0
TK. TAN 10	Excavator	0	10.5	
KM. MUTIARA OCEAN	Ship Crane		21.5	
M. SEJAHTERA 27	Ship Crane		22	
KM. ASIA RAYA	Ship Crane		19.08	
KM. INTAN 51	Ship Crane		16.5	
M. ASIA RAYA	Ship Crane		27.5	
TOTO XI	Excavator		11	
MV. SURPLUS		4.74	26	2.5
KM. JML GLORY	Excavator		10.83	
KM. INTAN 71	Ship Crane	1	18.99	
			9.33	
KM. ABADI PERMAI	Excavator		21.29	4.47
M. TENANG JAYA 1	Ship Crane	13	20	
BG. SAMUDRA BINTAN 2401	Excavator	2.5	10.5	
KM. KARUNIA PERMAI	Ship Crane	4.21	29.63	
MV. CLEANTEC	Gantry Crane	1.91	7.08	12.91
TK. TAN 10	Excavator	4	15	
BG. TOTO VIII	Excavator		15	
KM. INTAN 51	Ship Crane	0.3	11	
KM. BAHARI II	Ship Crane	1.3	22	5
KM. INTAN 81	Ship Crane		31	
KM. LINTAS BAHARI 66	Ship Crane		21.32	
KM. BSP VIII	Ship Crane	2.66	4.66	
KM. SAHABAT SEJATI 8	Ship Crane	23.16	30	
TK. NELLY 34	Excavator	1.33	10.5	
KM. MELLISA	Ship Crane	2.5	29.41	
KM. FLYING FISH 518	Ship Crane	5.07	10.32	
G. TOTO XV	Excavator		11	
BG. SINAR KOTA BESI V	Excavator		9	
TOTAL		75.71	545.64	38.64

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

9. Pelayanan Bongkar Muat Belum 24/7

Kondisi

Dari tabel di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- Dari sekian faktor penyebab *idle time* hanya 3 faktor penyebab yang paling dominan yaitu cuaca (hujan), tunggu truk (*waiting truck*) dan *stop* kegiatan (*knocking off*).
- Faktor paling tinggi adalah *stop* kegiatan (*knocking off*) selama 545,64 Jam (83%) dari total *idle time* yang apabila dikonversi sama dengan 22 hari 17 jam. Sedangkan untuk *idle time* yang disebabkan oleh cuaca hanya selama 75.71 jam (11%) atau selama 3 hari 3 jam dan *waiting Truck* selama 38.64 jam (5.85) atau 1 hari 14 jam.

Dari *idle time* yang dikarenakan *knocking off* paling dominan penyebabnya adalah kegiatan di gudang penerima tidak bekerja 24 jam 24/7. Biasanya kegiatan gudang dibatasi hanya sampai dengan jam 17.00 hingga 20.00. Hal ini dikarenakan buruh di gudang terbatas jumlahnya.

Namun demikian untuk kegiatan pelayanan barang import dan eksport kegiatan di gudang penerima maupun gudang muatan dapat dilaksanakan 24 jam terlebih lagi gudang yang menyediakan alat mekanis. Pelayanan kegiatan bongkar dan muat petikemas di terminal petikemas juga dapat dilaksanakan 24/7. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebenarnya kegiatan B/M di pelabuhan Panjang dapat dijalankan 24/7.

Di provinsi Lampung terdapat 36 Gudang yang menjadi tempat penumpukan *cargo* yang dibongkar dan akan dimuat di pelabuhan. PT PTP Cabang Panjang juga dapat mengelola 2 gudang di lini 1 pelabuhan Panjang dengan masing-masing luas gudang seluas 3.600 M2 yaitu gudang 001 dan gudang 008. selain itu masih terdapat gudang lainnya yang dapat digunakan untuk *cargo doring* di lini 2 yaitu gudang Marcopolo seluas 960M2 dan Gudang Api (dapat dialihfungsikan) seluas 800M2. Pengelolaan gudang-gudang tersebut dapat dikoordinasikan dengan Pelindo Regional 2 Panjang.

Tingginya *idle time* pasti menyebabkan ET (*effective time*) berkurang dan kinerja ET/BT (*effective time per berthing time*) juga akan berkurang persentasenya. Selanjutnya BOR (*Berth Occupancy Ratio*) juga berkurang sehingga mengakibatkan *dwelling time* kapal tinggi yang artinya dapat menyebabkan antrian kapal di areal labuh yang bisa menjadi *issue* Nasional

Pada setiap perencanaan penyandaran kapal, cabang Panjang telah menandatangani Kesepakatan Pelayanan Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan Panjang yang berisi :

- Data Kapal
- Pembagian Tanggung Jawab
- Isi Kesepakatan

Sebagaimana sampel dokumen berikut :

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

9. Pelayanan Bongkar Muat Belum 24/7

Kriteria

- Undang-undang Pelayaran Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 Tentang kepelabuhanan (pasal 97 ayat 2);
- Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (pasal 86).

Root Cause

- Belum dilaksanakannya koordinasi dengan *Stakeholder* terkait dengan pelaksanaan pelayanan 24/7 terkait kegiatan gudang penerima yang tidak menerapkannya;
- Belum adanya sanksi terhadap pengguna jasa apabila kapal gantung *sling* akibat dari gudang penerima tidak beroperasi 24/7.

Implikasi Terhadap Bisnis

Menurunnya kinerja perusahaan akibat *idle time* tinggi yang dapat berpotensi menurunkan pendapatan dan meningkatkan biaya.

Rekomendasi:

PIC Temuan Audit/Batas Waktu

Prioritas

- Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* (KSOP, GM Pelindo Regional 2 Panjang, INSA, APBMI dan Asosiasi lainnya agar ditetapkan pelayanan 24/7.
- Memberikan alternatif dan sanksi apabila tidak dapat dilaksanakannya kegiatan 24/7. Alternatif yang ditawarkan dapat berupa pemanfaatan gudang baik lini 1 maupun lini 2 yang berada di pelabuhan Panjang dengan membuat kesepakatan/kerja sama dengan mitra dan Pelindo Regional 2 Panjang
- Membuat komitmen dengan pengguna jasa dengan isi kesepakatan untuk melabuhkan kapal setelah perpanjangan masa tambat pertama dengan biaya ditanggung mitra
- Membuat komitmen dengan mitra untuk melakukan kegiatan 24/7 per kapal

**Branch Manager
Cabang Panjang**

31 Oktober 2022

31 Oktober 2022

30 November 2022

30 November 2022

1

1

2

2

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

10. Pemakaian Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL)

Kondisi

Dalam memenuhi kekurangan tenaga kerja, Cabang Panjang menggunakan Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) untuk pekerjaan administrasi maupun pekerjaan operasional (operator, foreman).

Rekapitulasi Pembayaran Petugas Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) Periode bulan September 2021 s.d Agustus 2022 sebagaimana table berikut :

PEMBAYARAN PETUGAS TENAGA KERJA HARIAN LEPAS (TKHL)
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG PANJANG
PERIODE BULAN SEPTEMBER 2021 S/D AGUSTUS 2022

NO	NAMA	JABATAN	KET	SEPT 21	OKT 21	NOV 21	DES 21	JAN 22	FEB 22	MAR 22	APR 22	THR	MEI 22	JUN 22	JUL 22	AGUST 22	TOTAL
1	FUAD ABDUL AZIZ	Pel. Piutang dan Pajak	STAFF	3,080,000	3,080,000	3,430,000	2,590,000	3,640,000	2,940,000	2,450,000	3,120,794	2,770,794	3,952,032	3,952,032	3,674,953	2,982,254	41,662,859
2	TARISA SAFITRI	Pel. HSSE	STAFF	3,220,000	3,360,000	3,080,000	2,380,000	3,640,000	2,800,000	2,660,000	3,120,794	2,770,794	2,843,715	3,120,794	3,120,794	3,397,873	39,514,764
3	RAYA RIANTAMA	Pel. Teknik dan SI	STAFF	2,800,000	2,940,000	3,080,000	2,380,000	3,710,000	2,310,000	2,730,000	3,120,794	2,770,794	3,120,794	3,259,333	3,397,873	3,536,413	39,156,001
4	DINDA AYU	Pel. Komersial	STAFF	-	-	-	-	-	2,380,000	2,730,000	3,120,794	2,770,794	2,012,476	-	-	-	13,014,064
5	WALID AQSO	Pel. Shuttle care	PLUG 1	2,660,000	2,380,000	3,080,000	2,380,000	3,640,000	3,080,000	2,660,000	3,320,794	2,770,794	3,736,413	3,320,794	3,320,794	3,182,254	39,531,843
6	ALFIAN BAYUMI	Operator Gate	GROUP A	-	2,380,000	2,800,000	2,240,000	3,360,000	2,940,000	2,660,000	3,320,794	2,770,794	3,459,334	3,320,794	3,320,794	3,320,794	35,893,304
7	MADIYAN	Operator Gate	GROUP A	-	-	2,800,000	2,240,000	3,360,000	2,940,000	2,660,000	3,320,794	2,770,794	2,905,175	3,320,794	3,320,794	3,320,794	32,959,145
8	WIWIK PURNOMO	Pel. Operator Pompa	GROUP A	-	-	2,800,000	2,240,000	3,360,000	2,100,000	1,960,000	3,320,794	2,770,794	3,320,794	3,043,715	3,320,794	3,320,794	31,557,685
9	INDRA YUSUF	Pel. RENTAL	GROUP A	2,520,000	2,800,000	3,080,000	3,080,000	3,780,000	2,940,000	2,660,000	3,320,794	2,770,794	3,320,794	3,320,794	3,320,794	3,320,794	40,234,764
10	FARIS NASIRUDIN	Pel. RENTAL	GROUP B	2,520,000	2,800,000	3,080,000	2,100,000	3,360,000	2,940,000	2,520,000	3,320,794	2,770,794	3,320,794	3,320,794	3,320,794	3,320,794	38,694,764
11	RIZAL DARSAH	Operator Gate	GROUP B	2,520,000	2,940,000	3,080,000	2,100,000	3,220,000	3,080,000	2,520,000	3,320,794	2,770,794	3,320,794	3,043,715	3,320,794	3,320,794	38,557,685
12	IVAN SETIAWAN	Operator Gate	GROUP B	-	-	3,080,000	2,100,000	3,360,000	3,080,000	2,520,000	3,320,794	2,770,794	3,320,794	3,320,794	3,320,794	3,320,794	33,514,764
13	ENDI APRIANSYAH	Pel. Operator Pompa	GROUP B	-	-	2,520,000	2,240,000	3,080,000	3,080,000	2,520,000	3,320,794	2,770,794	3,320,794	3,320,794	3,320,794	3,320,794	32,814,764
14	DODI PEROLIN	Operator Gate	GROUP B	2,520,000	2,800,000	3,080,000	3,080,000	3,500,000	2,800,000	2,520,000	3,320,794	2,770,794	3,459,334	3,320,794	3,320,794	3,320,794	39,813,304
15	DWI PRAKOSO	Foreman	GROUP C	2,800,000	2,800,000	3,080,000	2,100,000	3,360,000	2,940,000	2,660,000	3,320,794	2,770,794	3,597,873	3,320,794	3,320,794	3,320,794	39,391,843
16	ASEP KURNIAWAN	Operator Gate	GROUP C	2,520,000	2,800,000	2,520,000	2,100,000	3,360,000	2,940,000	2,660,000	3,320,794	2,770,794	3,597,873	3,320,794	3,320,794	3,320,794	38,551,843
17	FARREL ABID RIFQY	Operator Gate	GROUP C	-	-	3,080,000	2,100,000	3,360,000	2,940,000	2,660,000	3,320,794	2,770,794	3,320,794	3,320,794	3,320,794	3,320,794	33,514,764
18	DARTOBIEN	Pel. Operator GLC & GJC	GROUP C	-	-	2,660,000	2,100,000	3,220,000	2,940,000	2,660,000	4,520,794	2,770,794	4,520,794	4,520,794	3,966,635	4,520,794	38,400,605
19	IWAN KAMAJAYA	Pel. Operator Forkift	GROUP C	2,380,000	3,220,000	3,220,000	2,380,000	3,360,000	3,220,000	2,660,000	3,370,794	2,770,794	3,370,794	3,370,794	3,093,715	3,370,794	39,787,685
20	SABITU ROCHIM			2,800,000	2,940,000	3,080,000	2,380,000	3,640,000	1,540,000	-	-	-	-	-	-	-	16,380,000
JUMLAH				32,340,000	37,240,000	56,630,000	44,310,000	65,310,000	55,930,000	49,070,000	63,545,086	52,645,086	63,822,165	60,839,911	60,424,292	60,839,910	702,946,450

10. Pemakaian Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL)

Kondisi

Berdasarkan reuiu terkait TKHL disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Periode September 2021 s.d. Maret 2022 menurut keterangan Cabang Panjang upah TKHL per hari sebesar Rp140.000 (mengacu pada *tally*) dan kelebihan kerja sebesar Rp70.000 per hari;
- b. Periode April 2022 dan seterusnya berdasarkan Berita Acara Nomor UM.339/11/4/1/PJG.PTP-22 tanggal 11 April 2022 tentang Penyesuaian Honor/Upah Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Panjang yang ditandatangani sepihak oleh *Branch Manager* Cabang Panjang, dengan hasil sebagai berikut :

1) Tarif honor/upah TKHL dengan besaran sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH ORANG	SATUAN
1	Upah Pokok	18	2.770.794
2	Tunjangan Kompetensi :		
	Administrasi	3	350.000
	Operasional	13	550.000
	Operator Alat Pendukung	1	600.000
	Operator Alat Utama	1	1.750.000

- 2) Apabila pekerja tidak masuk karena sesuatu hal apapun maka mengurangi gaji pokok pekerja dengan nominal Rp138.540,00/hari;
- 3) Kelebihan hari kerja dapat dibayarkan minimal 4 jam/hari, dengan nominal 1 jam = Rp17.317,00 atau 1 hari = Rp138.540,00;
- 4) Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) harus tunduk dan patuh terhadap segala peraturan yang berlaku di PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Panjang;
- 5) Pembayaran atas honor/upah dilakukan dengan cara ditransfer kepada masing-masing pekerja;
- 6) Jangka Waktu Perjanjian berlaku mulai tanggal 11 April 2022.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

10. Pemakaian Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL)

Kondisi

- Berita Acara Kesepakatan Penyesuaian Honor/Upah dengan TKHL hanya ditandatangani oleh Branch Manager seharusnya ditandatangani oleh para TKHL;
- Tidak ada perjanjian antara Cabang Panjang dengan TKHL, hubungan kerja disyaratkan ada Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Buruh/Pekerja yang melakukan pekerjaan sekurang-kurangnya memuat :
Nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja.
Nama/alamat pekerja/buruh.
Jenis Pekerjaan yang dilakukan.
Besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.
- Komponen Upah TKHL terdiri dari upah pokok, upah kelebihan jam kerja, tunjangan kompetensi dan tunjangan kompetensi ini tidak dipotong jika TKHL tidak masuk kerja sehingga menjadi tunjangan tetap.
- Pekerja yang tidak masuk kerja karena sesuatu hal apapun yang dikurangi upah pokoknya saja dengan nominal Rp138.540/hari ($\text{Rp}2.770.794 : 20 = \text{Rp}138.540$) seharusnya tunjangan kompetensipun ikut dipotong;
- Dalam menetapkan upah per hari pembagiannya 20 hari sehingga berdampak kepada besaran upah per jam Berdasarkan PP No. 36 tahun 2021 bagi perusahaan dengan system waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu) sedangkan Cabang Panjang membagi upah dengan 20 hari sehingga hasil lebih besar;
Cabang : ($\text{Rp}2.770.794 : 20 = \text{Rp}138.540$), PP ($\text{Rp}2.770.794 : 21 = \text{Rp}131.943$) selisih Rp6.587.
Cabang : ($\text{Rp}2.770.794 : 20 = \text{Rp}138.540 : 8 = \text{Rp}17.317$), PP ($1/173 \times \text{Rp}2.770.794 = \text{Rp}16.016$) selisih Rp1.301
- TKHL melaksanakan tugas sebagai operator alat utama, operator alat pendukung, petugas operasional dan administrasi;
- Dalam Berita Acara jangka waktu perjanjian hanya disebutkan mulai berlakunya saja sedangkan Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
- Cabang membayarkan lebih kerja/lembur dikali dengan upah perhari Rp138.540 seharusnya berdasarkan PP No.35 tahun 2021 upah perjam = $1/173 \times \text{Upah} (\text{Rp}2.770.794) = \text{Rp}16.016$

LEBIH KERJA/ LEMBUR	Rp 138,540	Rp 16,016	SELISIH
	CABANG	PP 35/2021	
4	Rp 554,159	Rp 96,097	Rp 458,062
2	Rp 277,079	Rp 48,048	Rp 229,031
3	Rp 415,619	Rp 72,073	Rp 343,546

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

10. Pemakaian Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL)

Kondisi

c. Contoh Perhitungan Kelebihan Jam Kerja



**PEMBAYARAN PETUGAS TENAGA KERJA HARIAN LEPAS (TKHL)
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK CABANG PANJANG
Periode Bulan 26 Juli sd 25 Agustus 2022**

											Rp	138,540	Rp	138,540	Rp	17,317.46
NO	NAMA	JABATAN	KET	ABSENSI			TIDAK MASUK	LEBIH KERJA	Tidak Masuk	Lebih Kerja	GAJI POKOK	TUNJANGAN	TOTAL			
				MANGKIR	IJIN	SAKIT			NOMINAL	NOMINAL						
1	Fuad Abdul Aziz	Pel. Piutang dan Pajak	STAFF	-	5	-	-	4	Rp 692,699	Rp 554,159	Rp 2,770,794	350,000	2,982,254			
2	Tarisa Safitri	Pel. HSSE	STAFF	-	-	-	-	2	Rp -	Rp 277,079	Rp 2,770,794	350,000	3,397,873			
3	Raya Riantama	Pel. Teknik dan SI	STAFF	-	-	-	-	3	Rp -	Rp 415,619	Rp 2,770,794	350,000	3,536,413			
4	Walid Aqso	Pel. Shuttle care	PLUG 1	-	1	-	-	-	Rp 138,540	Rp -	Rp 2,770,794	550,000	3,182,254			
5	Alfian Bayumi	Operator Gate	GROUP A	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp 2,770,794	550,000	3,320,794			
6	Madiyan	Operator Gate	GROUP A	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp 2,770,794	550,000	3,320,794			
7	Wiwik Purnomo	Pel. Operator Pompa	GROUP A	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp 2,770,794	550,000	3,320,794			
8	Indra Yusuf	Pel. Rendal	GROUP A	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp 2,770,794	550,000	3,320,794			
9	Faris Nasirudin	Pel. Rendal	GROUP B	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp 2,770,794	550,000	3,320,794			
10	Rizal Darsah	Operator Gate	GROUP B	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp 2,770,794	550,000	3,320,794			
11	Ivan Setiawan	Operator Gate	GROUP B	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp 2,770,794	550,000	3,320,794			
12	Endi Apriansyah	Pel. Operator Pompa	GROUP B	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp 2,770,794	550,000	3,320,794			
13	Dodi Perolin	Operator Gate	GROUP B	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp 2,770,794	550,000	3,320,794			
14	Dwi Prakoso	Foreman	GROUP C	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp 2,770,794	550,000	3,320,794			
15	Asep Kurniawan	Operator Gate	GROUP C	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp 2,770,794	550,000	3,320,794			
16	Varrel Abid Rifqy	Operator Gate	GROUP C	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp 2,770,794	550,000	3,320,794			
17	Dartobien	Pel. Operator GLC & GJC	GROUP C	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp 2,770,794	1,750,000	4,520,794			
18	Iwan Kamajaya	Pel. Operator Forkift	GROUP C	-	-	-	-	-	Rp -	Rp -	Rp 2,770,794	600,000	3,370,794			
TOTAL													60,839,911			

Terjadi peningkatan biaya TKHL apabila dibandingkan antara biaya sebelum dan sesudah penyesuaian. Pembayaran TKHL sebelum adanya Berita Acara Penyesuaian Honor/Upah (bulan Maret 2022) dengan jumlah TKHL sebanyak 19 orang sebesar Rp49.070.000,00 dan setelah adanya Berita Acara Penyesuaian Honor/Upah (bulan April 2022) dengan jumlah pegawai yang sama (19 orang) sebesar Rp63.545.086,00 meningkat sebesar Rp14.475.086,00.

10. Pemakaian Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL)

Kriteria

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja
 - 1) Pasal 2 (1) : Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh.
 - 2) Pasal 2 (4) : Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
 - 3) Pasal 5 (3) : Selain pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)', PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap.
 - 4) Pasal 10 (1) : PKWT yang dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah Pekerja/Buruh berdasarkan kehadiran.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan

Pasal 17 : Dalam hal Upah ditetapkan secara harian, perhitungan Upah sehari sebagai berikut :

 - Bagi perusahaan dengan system waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau
 - Bagi Perusahaan dengan system waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu).

Root Cause

- a. Kurangnya kelengkapan administrasi pengelolaan TKHL (Perjanjian, Administrasi Pengupahan);
- b. Cabang Panjang menetapkan upah TKHL sebagaimana upah Tenaga Alih Daya (TNO) dengan memasukkan tunjangan keahlian/kompetensi secara lumpsum per bulan bukan berdasarkan kehadiran/kegiatan;
- c. Penetapan pembagi upah per hari pembaginya 20 hari karena cabang menghitung dalam 1 minggu 5 hari dikali 4 minggu.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

10. Pemakaian Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL)

Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Berpotensi adanya permasalahan hukum dikemudian hari;
- b. Jika terjadi kecelakaan dapat menimbulkan permasalahan karena administrasi yang tidak memadai.

Rekomendasi:

PIC Temuan Audit/Batas Waktu

Prioritas

- a. *Branch Manager* Cabang Panjang berkoordinasi dengan Kantor Pusat terkait peraturan sebagai acuan dalam penetapan komponen upah, jenis dan sifat pekerjaan yang diperbolehkan dikerjakan oleh TKHL.
- b. Memenuhi persyaratan administrasi pengelolaan TKHL terkait dengan Perjanjian Kerja
- c. Mereviu Berita Acara Nomor UM.339/11/4/1/PJG.PTP-22 tanggal 11 April 2022 tentang Penyesuaian Honor/Upah Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Panjang.

Branch Manager
Cabang Panjang
30 November 2022

2

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

11. Inkonsistensi Pencatatan Beban Pegawai pada Laporan Keuangan Agustus 2022 PTP Cabang Panjang

Kondisi

Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor KP.412/30/9/3/PTP-21 tanggal 30 September 2021 sebagai berikut:



SURAT PERINTAH PELAKSANAAN TUGAS

Nomor : KP.412/30/9/3/PTP-21

1. **DASAR** : a. Sehubungan dengan Roadmap dan Transformasi Operasional khususnya untuk monitoring kegiatan operasi di seluruh area Cabang PT Pelabuhan Tanjung Priok;
b. Untuk kepentingan dinas.
2. **DIPERINTAHKAN KEPADA** : Daftar Nama Terlampir.
3. **ISI PERINTAH** : a. Seterimanya Surat Perintah Pelaksanaan Tugas ini agar melaksanakan tugas sebagaimana daftar terlampir;
b. Sebelum melaksanakan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas ini agar melapor kepada atasan langsung;
c. Agar melaksanakan perintah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.
4. **LAIN-LAIN** : a. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas ini tidak mengubah ketentuan besaran penghasilan dan administrasi penggajian tetap di PT Pelabuhan Tanjung Priok;
b. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas ini berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2021, untuk selanjutnya akan dievaluasi dan disesuaikan kembali seiring dengan dinamika dan kebutuhan organisasi dilingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.
5. **PERINTAH SELESAI**

DIKELUARKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 30 September 21

**PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTUR KEUANGAN DAN SDM,**



Lampiran : Surat Direktur Keuangan dan SDM
Nomor : KP.412/30/9/3/PTP-21
Tanggal : 30 September 2021

NO	NAMA/NIPP	JABATAN	KELAS	JABATAN PELAKSANA TUGAS (Pit) PADA
1	SUGENG PRIYANTO NIPP. 294027865	Junior Assistant Officer Perencanaan dan Pengendalian Operasi Wilayah II Tanjung Priok	13	Senior Assistant Officer Pengendalian Operasi
2	HANDRI HERMANSYAH NIPP. 288108481	Senior Operator Bongkar Muat Bengkulu A	14	Senior Administrator Pengendalian Operasi
3	RAMDANI NURUL HAKIM NIPP. 290048617	Senior Operator Bongkar Muat Bengkulu A	14	Senior Administrator Pengendalian Operasi
4	RYAN FAJAR MUHAROM NIPP. 289088489	Senior Operator Bongkar Muat Bengkulu A	14	Senior Administrator Pengendalian Operasi
5	RICKY LAZUARDI NIPP. 282038390	Senior Operator Bongkar Muat Panjang	14	Senior Administrator Pengendalian Operasi
6	AHMAD SYARIF NIPP. 284058416	Senior Operator Bongkar Muat Panjang	14	Senior Administrator Pengendalian Operasi
7	MOKHAMAD TAUFIQ NIPP. 281058380	Senior Operator Bongkar Muat Panjang	14	Senior Administrator Pengendalian Operasi
8	INSAN PRIBADI NIPP. 290038493	Senior Operator Bongkar Muat Panjang	14	Senior Administrator Pengendalian Operasi

Dari kutipan Surat Perintah Pelaksanaan Tugas (SPPT) tersebut di atas:

- a. Adanya mutasi 4 orang pegawai PTP Cabang Panjang ke PTP Pusat.
- b. Menyebutkan bahwa Surat Perintah Pelaksanaan Tugas ini berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2021.
- c. Perubahan mutasi harus diikuti dengan perubahan *branch costing* pada sistem SIMPER

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

11. Inkonsistensi Pencatatan Beban Pegawai pada Laporan Keuangan Agustus 2022 PTP Cabang Panjang

Kondisi

Data rekap jurnal adjustment atas beban 4 pegawai yang mutasi pada Laporan Keuangan periode Oktober 2021 s.d Agustus 2022 di PTP Cabang Panjang adalah sebagai berikut:

NO	DESKRIPSI	OCT 21	NOV 21	DEC 21	JAN 22	FEB 22	MAR 22	APR 22	MAY 22	JUN 22	JUL 22	AUG 22
1	Beban Asuransi Tenaga Kerja	2.850.000	2.850.000	8.993.975	-	-	-	-	-	-	-	83.885.021
2	Beban Pegawai Tunjangan THT	-	-	1.257.258	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Gaji 13	-	-	91.130.800	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Insentif Lainnya	-	6.752.331	8.168.564	-	-	-	-	-	-	-	63.961.256
5	Insentif Performansi	11.139.600	12.977.000	7.581.600	-	-	-	-	-	-	-	60.652.800
6	Penghasilan Merit	28.966.750	28.966.750	24.392.180	-	-	-	-	-	-	-	185.387.200
7	Tunjangan Mobilitas Transport	5.985.000	5.985.000	4.788.000	-	-	-	-	-	-	-	37.977.546
8	Tunjangan Pajak Penghasilan	4.503.275	4.503.275	3.901.920	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tunjangan Perumahan	14.715.000	14.715.000	11.772.000	-	-	-	-	-	-	-	94.176.000
10	Lembur	-	2.703.584	-	-	-	-	-	-	-	-	24.332.256
11	Tunjangan Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.130.800
12	Tunjangan Cuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82.017.720
13	Tunjangan Hari Raya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.913.500
14	Lumpsum Sewa Rumah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.000.000
15	Jasa Produksi/Bonus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.316.332
TOTAL		68.159.625	79.452.940	161.986.297	-	-	-	-	-	-	-	1.123.750.431

Dari data tersebut di atas dapat kami jelaskan bahwa :

- Adanya pencatatan jurnal *adjustment* dari periode Oktober s.d Desember 2021 oleh divisi Keuangan PTP Pusat atas reklasifikasi beban pegawai 4 orang pegawai yang dimutasi, dikarenakan SDM PTP Pusat memberikan rekapitulasi atas biaya 4 orang pegawai yang mutasi tersebut.
- Namun untuk rekapitulasi dari bulan Januari 2022 s.d Juli 2022 SDM PTP Pusat tidak belum memberikan rekap di bulan berjalannya, jurnal *adjustment* periode januari 2022 s.d juli 2022 tidak dicatat diperiode berjalan namun dicatat di bulan Agustus 2022.
- Beban pegawai bulan agustus 2022 turun drastis dikarenakan adanya jurnal *adjustment* selama 8 bulan (Januari 2022 s.d Agustus 2022) dari 4 pegawai yang dimutasi ke PTP Pusat.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

11. Inkonsistensi Pencatatan Beban Pegawai pada Laporan Keuangan Agustus 2022 PTP Cabang Panjang

Kondisi

Data Beban Pegawai pada Laporan Keuangan periode Juli 2022 dan Agustus 2022 PTP Cabang Panjang adalah sebagai berikut:

NO	DESKRIPSI	AGUSTUS 2021	JULI 2022	AGUSTUS 2022	SELISIH	
		1	2	3	4 = 3-2	5 = 3-2
1	80101021 Penghasilan Merit	192.193.260	185.441.100	53.900	- 185.387.200	- 192.139.360
2	80101031 Tunjangan Mobilitas Transport	29.758.910	30.591.910	- 4.104.364	- 34.696.274	- 33.863.274
3	80101032 Tunjangan Jabatan	12.586.000	11.601.000	11.601.000	-	- 985.000
4	80101033 Tunjangan Perumahan	90.446.000	87.053.000	- 7.123.000	- 94.176.000	- 97.569.000
5	80101034 Tunjangan Cuti	-	-	- 82.017.720	- 82.017.720	- 82.017.720
6	80101035 Tunjangan Hari Raya	84.493.064	82.807.507	- 31.105.993	- 113.913.500	- 115.599.057
7	80101036 Insentif Performansi	52.927.500	54.529.600	- 3.131.700	- 57.661.300	- 56.059.200
8	80101038 Tunjangan Utilitas		7.350.000	3.350.000	- 4.000.000	3.350.000
9	80101039 Tunjangan Lainnya	-	-	-	-	-
10	80101041 Lembur	25.868.578	6.191.087	- 17.751.712	- 23.942.799	- 43.620.290
11	80101043 Insentif UTPK	-	-	-	-	-
12	80101044 Insentif Lainnya	-	42.120.092	- 22.141.358	- 64.261.450	- 22.141.358
13	80101051 Jasa Produksi/Bonus	- 127.952.891	206.868.899	- 53.447.433	- 260.316.332	74.505.458
14	80101061 Tunjangan Pajak Penghasilan	136.466.267	126.098.131	241.539.356	115.441.225	105.073.089
15	80101064 Tunjangan Pendidikan	115.962.862	66.274.050	- 24.856.750	- 91.130.800	- 140.819.612
16	80101066 Tunjangan Fasilitas Kendaraan	-	30.971.500	34.597.500	3.626.000	34.597.500
17	80101067 Gaji 13	88.959.510	66.110.482	66.110.482	-	- 22.849.028
18	80101081 Tunjangan Pasca Kerja	17.663.000	- 106.698.000	-	106.698.000	- 17.663.000
19	80101901 Beban Pegawai Tunjangan THT	3.536.000	- 21.360.000	-	21.360.000	- 3.536.000
20	80101999 Beban Pegawai Lainnya	-	-	-	-	-
JUMLAH		722.908.060	875.950.358	111.572.208	- 764.378.150	- 611.335.852

Dari data tersebut di atas disimpulkan bahwa:

Pencatatan atas beban pegawai di PTP Cabang Panjang pada bulan Agustus 2022 sebesar Rp111.572.208,00 atau turun sebesar Rp764.378.150,00 (87,26%) jika dibandingkan dengan periode Juli 2022 sebesar Rp875.950.358,00 apabila dibandingkan dengan periode Agustus 2021 maka turun sebesar Rp. 611.355.852,00 (84,57%).

Hal ini berarti adanya penurunan atas pencatatan biaya pegawai lebih dari setengah biaya pegawai yg dicatatkan dibulan sebelumnya maupun tahun sebelumnya di periode yang sama.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

11. Inkonsistensi Pencatatan Beban Pegawai pada Laporan Keuangan Agustus 2022 PTP Cabang Panjang

Kriteria

- Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor KP.412/30/9/3/PTP-21 tanggal 30 September 2021.
- Kebijakan Akuntansi PT Pelabuhan Tanjung Priok yang menyatakan diantaranya adalah beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

Root Cause

- Adanya perpindahan 4 orang karyawan PTP Cabang Panjang ke PTP Pusat Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2021, yang tidak diikuti dengan perubahan *branch* pada *costing payroll* di sistem SIMPER.
- Tidak dibuatnya jurnal adjustment secara konsisten dari periode Januari 2022 sampai dengan Juli 2022.
- Jurnal *adjustment* periode Januari 2022 s.d Agustus 2022 atas mutasi 4 pegawai dibuat di periode Agustus 2022 sehingga menyebabkan saldo beban pegawai PTP Cabang Panjang mengalami *understated*.

Implikasi Terhadap Bisnis

- Tidak akuratnya laporan keuangan PTP Cabang Panjang periode Agustus 2022 dikarenakan adanya saldo beban pegawai yang *understated*.
- Penyajian laporan keuangan belum menggambarkan kondisi keuangan sebenarnya.

Rekomendasi:

- Membuat Surat Dinas kepada Direktur Keuangan & SDM PTP untuk meminta data rekapitulasi biaya pegawai yang di mutasi berdasarkan SPPT.
- Melakukan jurnal koreksi terkait dengan pembebanan 4 pegawai yang dimutasi berdasarkan SPPT.

PIC Temuan
Audit/Batas Waktu

**Branch Manager
Cabang Panjang**
31 Oktober 2022

Prioritas

1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

12. Kesalahan Pada Pencatatan Revenue Sharing atas Dermaga C1 & C2 antara PTP dengan IKT

Kondisi :

Biaya buruh dan tenaga kerja pada Laporan Keuangan periode Januari 2022 s.d Agustus 2022 PTP Cabang Panjang adalah sebagai berikut:

NO	SUMMARY	TOTAL BIAYA
1	TKHL	471.586.540
2	TKBM	14.060.767.795
3	PT SATRIA RAKSA BUMINUSA	361.730.153
4	PT KEKAR INSAN SEJAHTERA	149.243.279
5	PT LINTASAN NUSANTARA PRIMA	3.633.757.666
6	PT INDONESIA KENDARAAN TERMINAL	1.141.757.455
7	HSSE (PENGAMANAN PELABUHAN)	536.681.146
8	JURNAL ADJUSTMENT	- 3.440.155.349
TOTAL		16.915.368.685

Berdasarkan pengujian pada Berita Acara Kesepakatan Nomor UM.339/30/9/5/IKT.21 dan UM.339/30/9/8/PTP.21 tanggal 30 bulan September tahun 2021 Antara PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT) dan PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) tentang Kerja Sama Pelayanan Jasa Pelabuhan Di Terminal RORO (Dermaga C1 dan C2 Pelabuhan Panjang) diketahui bahwa:

- Belum diterimanya Berita Acara Pencocokan dan Penelitian (Coklit) atas kegiatan bongkar muat yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- Tidak adanya pencatatan bulanan atas BYMH *revenue sharing* dari periode Januari 2022 s.d Agustus 2022 ke PT Indonesia Kendaraan Terminal.
- Tidak adanya Berita Acara Rekonsiliasi Afiliasi antara PTP dengan IKT.
- Pencatatan biaya buruh dan tenaga kerja atas PT IKT sebesar Rp. 1.141.757.455,00

12. Kesalahan Pada Pencatatan Revenue Sharing atas Dermaga C1 & C2 antara PTP dengan IKT

Kriteria

Berita Acara Kesepakatan Nomor UM.339/30/9/5/IKT.21 dan UM.339/30/9/8/PTP.21 Antara PT Indonesia Kendaraan Terminal dan PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Kerja Sama Pelayanan Jasa Pelabuhan di Terminal RORO (Dermaga C1 dan C2 Pelabuhan Panjang).

Root Cause

- a. Belum adanya koordinasi untuk melakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) atas kegiatan bongkar muat periode Januari s.d Agustus 2022 dengan PT IKT.
- b. Kekurangcermatan dalam membukukan biaya buruh dan tenaga kerja
- c. PT IKT belum bisa melakukan penagihan ke PT PTP atas pendapatan sharing dikarenakan BA Kesepakatan belum terbit di tahun 2021.

Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Besaran biaya *revenue sharing* periode Januari s.d Agustus 2022 belum dapat diketahui.
- b. Kelebihan catat atas biaya KSMU Buruh dan Tenaga Kerja sebesar Rp. 1.141.757.455 dan kurang catat atas biaya KSMU Kompensasi Non Tanah dan Bangunan sebesar Rp. 1.141.757.455;
- c. Laporan laba rugi PTP Cabang Panjang tahun 2022 terbebani dengan biaya yang seharusnya dibukukan pada tahun 2021 sebesar Rp. 1.141.757.455.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

72

12. Kesalahan Pada Pencatatan Revenue Sharing atas Dermaga C1 & C2 antara PTP dengan IKT

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
a. Melakukan koordinasi dengan IKT serta membuat BA Coklit & BA Rekonsiliasi Afiliasi yang ditandatangani oleh para pihak di setiap periode berjalan.	Branch Manager Cabang Panjang 31 Oktober 2022	1
b. Melakukan pembuatan jurnal akrual atas BYMH <i>Revenue sharing</i> kepada IKT berdasarkan BA Coklit & BA Rekonsiliasi Afiliasi.	10 November 2022	2
c. Membuat jurnal reklasifikasi/ <i>adjustment</i> atas salah pembebanan biaya buruh dan tenaga kerja ke beban biaya KSMU Kompensasi Non Tanah dan Bangunan.	31 Oktober 2022	1
Komentar Auditi: Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.		

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

13. Perbedaan Pencatatan dan Perhitungan Revenue Sharing PTP Cabang Panjang

Kondisi

Data rekapitulasi perhitungan *revenue sharing* PTP Cabang Panjang periode Januari 2022 s.d Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

NO	CABANG PANJANG	JUMLAH PENDAPATAN USAHA	BEBAN PENGURANG KONSESI (BEBAN TKBM/BEBAN SHARING)	BEBAN KONSESI	HAK CABANG REGIONAL 2	PENDAPATAN PTP DI LUAR AREA KERJASAMA	PENDAPATAN PTP DI LUAR AREA KERJASAMA (SETELAH DIKURANGI KONSESI 2,5%)	PENDAPATAN SHARING	REVENUE SHARING PTP KE SPMT		REVENUE SHARING SPMT KE PELINDO		TOTAL REVENUE SHARING	PENCATATAN REVENUE SHARING	SELISIH PENCATATAN
									PROSENTA SE (5%)	JUMLAH	PROSENTA SE (25%)	JUMLAH			
1	2	3	4	5 = 2,5% X (3-4)	6	7	8 = 3 - (5 + 6+7)	9 = 3 - (5 + 6+7)	9	10 = 8 X 9	11	12= 8X 11	13	14	15 = 13 - (10+12)
1	JANUARI 2022	7.008.769.629	2.929.205.745	101.989.097	111.576.676	1.776.421.227	1.732.010.696	5.063.193.160	5%	253.159.658	25%	1.265.798.290	1.518.957.948	2.102.630.888	583.672.940
2	FEBRUARI 2022	8.256.854.357	1.387.517.965	171.733.410	94.605.784	1.623.068.600	1.582.491.885	6.408.023.278	5%	320.401.164	25%	1.602.005.820	1.922.406.983	2.081.833.689	159.426.706
3	MARET 2022	9.970.512.310	2.901.127.502	176.734.620	165.412.890	2.262.305.300	2.205.747.668	7.422.617.132	5%	371.130.857	25%	1.855.654.283	2.226.785.140	3.112.175.860	885.390.720
4	APRIL 2022	9.932.256.413	3.251.839.430	167.010.425	172.213.122	1.675.603.200	1.633.713.120	7.959.319.746	5%	397.965.987	25%	1.989.829.937	2.387.795.924	2.945.922.689	558.126.765
5	MEI 2022	8.584.488.359	2.769.670.201	145.370.454	133.545.970	1.513.341.800	1.475.508.255	6.830.063.680	5%	341.503.184	25%	1.707.515.920	2.049.019.104	2.531.617.076	482.597.972
6	JUNI 2022	9.128.202.702	3.450.947.471	141.931.381	200.622.542	895.708.350	873.315.641	7.912.333.138	5%	395.616.657	25%	1.978.083.284	2.373.699.941	2.817.084.050	443.384.109
7	JULI 2022	8.507.407.356	4.027.602.407	111.995.124	125.844.914	898.188.700	875.733.983	7.393.833.336	5%	369.691.667	25%	1.848.458.334	2.218.150.001	2.072.113.350	146.036.651
8	AGUSTUS 2022	12.241.801.128	4.219.116.166	200.567.124	244.075.136	3.327.307.265	3.244.124.583	8.553.034.285	5%	427.651.714	25%	2.138.258.571	2.565.910.285	2.534.028.283	31.882.002
TOTAL		73.630.292.254	24.937.026.887	1.217.331.634	1.247.897.034	13.971.944.442	13.622.645.831	57.542.417.755		2.877.120.888		14.385.604.439	17.262.725.326	20.197.405.885	2.934.680.559

Dari data tersebut di atas dapat diketahui sebagai berikut:

- Total *Revenue sharing* PTP ke SPMT sebesar Rp17.262.725.326,00
- Pencatatan dan pembayaran *revenue sharing* PTP ke SPMT sebesar Rp20.197.405.885,00
- Terdapat kelebihan pencatatan biaya *revenue sharing* sebesar Rp2.934.680.559,00

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

13. Perbedaan Pencatatan dan Perhitungan Revenue Sharing PTP Cabang Panjang

Kriteria

- a. Perjanjian Kerja Sama Nomor HK.05.01/2/PLMT-2022 dan HK.566/4/1/1/PTP-22 tanggal 4 Januari 2022 antara PT Pelindo Multi Terminal dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok Tentang Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal *Multipurpose*.
- b. Berita Acara Kesepakatan Nomor: KS.03/28/7/1/PGPR/KMRL/REG2-22, KU.02.02/28/7/1/AKUSI/DKMR/PLMT-22 dan UM.339/28/7/1/PTP-22 tanggal 28 Juli 2022 tentang Hasil Pembahasan Pencocokan dan Penelitian Pendapatan atas Pelayanan *Multipurpose* Untuk Perhitungan dan Pembayaran *Revenue Sharing* Periode Semester 1 Tahun 2022

Root Cause

Pembebanan *revenue sharing* periode Januari s.d Juni 2022 dilakukan tanpa mengikuti proses pencocokan dan penelitian (Coklit).

Implikasi Terhadap Perusahaan

Kelebihan pembebanan dan pembayaran atas beban *revenue sharing* periode Januari s.d Juni 2022 sebesar Rp. 2.934.680.559,00

Rekomendasi:

PIC Temuan Audit/Batas Waktu

Prioritas

Melakukan koordinasi dengan Direktorat Komersial PTP Kantor Pusat dan/atau Pelindo Regional 2 Panjang agar kelebihan pembebanan dan pembayaran *revenue sharing* sebesar Rp2.934.680.559,00 dapat dikompensasikan dengan tagihan *revenue sharing* dibulan berikutnya.

**Branch Manager
Cabang Panjang**
31 Oktober 2022

1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

14. Laporan Pemantauan Risiko PTP Cabang Panjang belum Memadai

Kondisi

Pada tahun 2021, Perusahaan menerbitkan Peraturan Direksi Nomor HK.55/22/3/2/PTP-21 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok. Salah satu ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Direksi tersebut adalah mengatur tentang standar pengawasan dan pelaporan. Dalam ketentuan tata cara pencatatan dan pelaporan antara lain diatur bahwa hasil pengelolaan risiko harus dicatat dan didokumentasikan serta dilaporkan melalui mekanisme yang sesuai, serta laporan harus disampaikan tepat waktu, akurat dan dalam bentuk yang mudah dimengerti. Sebagai bagian dari pelaksanaan tata cara tersebut, Subdivisi Manajemen Risiko (melalui Kepala Divisi) setiap bulan menyampaikan Nota Dinas perihal Pemantauan Risiko yang diantaranya meminta Para *Senior Manager* dan *Branch Manager* untuk menyampaikan *review* laporan pemantauan risiko beserta dokumen atau data pendukung. Cabang Panjang memiliki sebanyak 32 (tiga puluh dua) risiko yang telah direncanakan mitigasinya. Dalam laporan-laporan tersebut, Cabang Panjang menguraikan pelaksanaan/realisasi dari mitigasi dari setiap risiko.

Berdasarkan pengujian atas laporan pemantauan risiko PTP Cabang Panjang diketahui dari 32 (tiga puluh dua) risiko tersebut terdapat mitigasi risiko dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 4 (empat) Risiko yang materi laporannya belum mencerminkan upaya mitigasi risiko yang dilakukan hanya meng-*copy paste* bulan sebelumnya atau dari rencana mitigasi risiko (Realisasi sama dengan Rencana Mitigasi). Kondisi ini tidak mencerminkan kondisi riil yang dilakukan. Sebagai contoh pada laporan yang dibuat seperti pada data di bawah:

No	Nama Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	Realisasi Mitigasi Risiko
1	Kebakaran disebabkan oleh kargo yang bersifat mudah terbakar (PKME, PKS, COAL, etc)	Melakukan tindakan pemadaman bekerjasama dengan pihak terkait, menyediakan saran APAR & membuat standarisasi pemadaman kebakaran	Melakukan tindakan pemadaman bekerjasama dengan pihak terkait, menyediakan saran APAR & membuat standarisasi pemadaman kebakaran
2	Rusaknya permukaan dermaga	1 Menghimbau kepada pihak penyedia alat <i>Excavator</i> agar menyediakan alas 2 Berkoordinasi dengan bagian teknik PTP Cabang Panjang agar dilakukan pengecekan berkala	1 Menghimbau kepada pihak penyedia alat <i>Excavator</i> agar menyediakan alas 2 Berkoordinasi dengan bagian teknik PTP Cabang Panjang agar dilakukan pengecekan berkala
3	Perubahan urutan kegiatan bongkar muat kargo dalam palka	<i>Briefing</i> sebelum kegiatan bongkar muat yang wajib diikuti oleh seluruh petugas terkait	<i>Briefing</i> sebelum kegiatan bongkar muat yang wajib diikuti oleh seluruh petugas terkait
4	Terhentinya proses bongkar muat curah cair via <i>pipe line</i>	1 Berkoordinasi dengan pihak <i>shipper</i> terkait dengan penggunaan <i>flow meter</i> Berkoordinasi dengan Tim <i>plugging</i> terkait prosedur pengencangan sambungan 2 memodifikasi <i>strainer</i> agar lebih mudah aliran muatan mengingat komoditi POME merupakan termasuk dalam klasifikasi limbah yang akan di <i>re-use</i>	1 Berkoordinasi dengan pihak <i>shipper</i> terkait dengan penggunaan <i>flow meter</i> Berkoordinasi dengan Tim <i>plugging</i> terkait prosedur pengencangan sambungan 2 memodifikasi <i>strainer</i> agar lebih mudah aliran muatan mengingat komoditi POME merupakan termasuk dalam klasifikasi limbah yang akan di <i>re-use</i>
5	Buruh Mogok	Berkoordinasi dengan Stakeholder dan keamanan setempat	Berkoordinasi dengan Stakeholder dan keamanan setempat

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

14. Laporan Pemantauan Risiko PTP Cabang Panjang belum Memadai

Kondisi

b. Laporan Realisasi Mitigasi Risiko yang belum melampirkan bukti/dokumen pendukung

Dari data laporan realisasi mitigasi risiko yang disampaikan terdapat beberapa realisasi mitigasi risiko yang belum dilengkapi dengan bukti/dokumen pendukung, seperti pada mitigasi risiko di bawah ini :

No	Nama Risiko	Rencana Mitigasi Risiko	Realisasi Mitigasi Risiko
1	Perubahan urutan kegiatan bongkar muat kargo dalam palka	<i>Briefing</i> sebelum kegiatan bongkar muat yang wajib diikuti oleh seluruh petugas terkait	<i>Briefing</i> sebelum kegiatan bongkar muat yang wajib diikuti oleh seluruh petugas terkait
2	Terhentinya proses bongkar muat curah cair via kade <i>lossing</i>	Berkoordinasi dengan pihak IPC Cabang Panjang untuk percepatan pengerjaan perbaikan dermaga C1	Perbaikan dermaga telah selesai
3	Kecelakaan kerja saat pelaksanaan bongkar muat	Melakukan sosialisasi secara rutin dan menggunakan APD dalam kegiatan B/M	Patroli kelengkapan atribut APD, sosialisasi secara rutin dan menggunakan APD dalam kegiatan B/M, dan memberikan teguran terhadap koperasi TKBM atas pelanggaran tersebut
4	Kecelakaan kerja di lokasi penyimpanan <i>Grab</i>	1 Mensosialisasikan kepada para pekerja Operasional terkait <i>safety</i> di lapangan 2 Memberikan rambu-rambu peringatan dilarang mendekati disekitar lokasi penyimpanan <i>Grab</i>	1 Menempatkan <i>Grab</i> di tempat yang aman dari lalu-lalang pekerja 2 Patroli sterilisasi area <i>Grab</i> parkir

Dari data di atas Cabang Panjang sudah membuat Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan Risiko beserta beberapa bukti pendukung realisasi mitigasinya di tahun 2022, namun semua itu hanya sebatas pemenuhan kebutuhan data audit saja belum secara khusus menyampaikan laporan tersebut kepada subdivisi Manajemen Risiko Kantor Pusat. Informasi yang didapat dari subdivisi Manajemen Risiko laporan yang diterima baru di bulan Maret saja dan beberapa bukti/dokumen pendukungnya. Hal ini disebabkan karena menumpuknya beban kerja pada personil yang ditunjuk sebagai PIC untuk pelaporan Pelaksanaan dan Pemantauan Risiko pada setiap bulannya. Terlepas dari hal tersebut Cabang Panjang sudah menunjuk PIC baru yang nantinya akan bertanggung jawab atas pelaporan Pelaksanaan dan Pemantauan Risiko di setiap bulannya.

Kriteria

- a. Lampiran Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor: HK.55/22/3/2/PTP-21 tanggal 22 Maret 2021 tentang Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko PT Pelabuhan Tanjung Priok, Klausul 6.7.2 tata Cara Pencatatan dan Pelaporan, antara lain menyatakan bahwa (a) hasil pengelolaan risiko harus dicatat dan didokumentasikan serta dilaporkan melalui mekanisme yang sesuai dan (b) setiap laporan harus disampaikan tepat waktu, akurat dan dalam bentuk yang mudah dimengerti;

14. Laporan Pemantauan Risiko PTP Cabang Panjang belum Memadai

Kriteria

- b. Nota Dinas perihal Pemantauan Risiko yang diantaranya menyebutkan bahwa menyampaikan *review* laporan pemantauan risiko beserta dokumen atau data pendukung.

Root Cause

- a. PTP Cabang Panjang dalam membuat laporan realisasi mitigasi risiko belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang riil hanya meng-*copy paste* bulan sebelumnya atau dari rencana mitigasi risiko;
- b. PTP Cabang Panjang belum mengirimkan beberapa bukti pendukung pada realisasi mitigasi risiko yang telah dilaksanakan pada Subdivisi Manajemen Risiko.

Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Tidak terlaksananya implementasi Manajemen Risiko secara optimal, karena masih sekedar pemenuhan kewajiban administrative;
- b. Laporan Pemantauan Risiko yang telah disampaikan, khususnya terhadap risiko yang belum sepenuhnya dapat memberikan acuan bagi Manajemen (khususnya di Cabang Panjang) untuk menetapkan langkah-langkah dalam menanggulangi risiko .

Rekomendasi:

PIC Temuan
Audit/Batas Waktu

Prioritas

Menyampaikan Pemantauan Risiko bulan September 2022 dan periode bulan selanjutnya kepada subdivisi Manajemen Risiko yang memuat kondisi yang riil/*valid* beserta bukti pendukung.

**Branch Manager
Cabang Panjang**
5 Oktober 2022

1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

15. Belum Sterilnya Tempat Penyimpanan Grab di Area Dermaga

Kondisi

Pada salah satu pemantauan risiko Cabang Panjang yaitu Kecelakaan Kerja di Tempat Penyimpanan *Grab* dengan rencana mitigasi risikonya yaitu :

- a. Mensosialisasikan kepada para pekerja Operasional terkait *safety* di lapangan;
- b. Memberikan rambu-rambu peringatan dilarang mendekati disekitar lokasi penyimpanan *Grab*.

Dari rencana mitigasi risiko tersebut Cabang Panjang menguraikan pelaksanaan realisasi mitigasi risikonya sebagai berikut :

- a. Menempatkan *Grab* di tempat yang aman dari lalu-lalang pekerja;
- b. Patroli sterilisasi area *Grab* parkir.

Namun saat peninjauan ke lapangan tidak ditemukan rambu-rambu peringatan dilarang mendekati area lokasi penyimpanan *Grab* dan masih didapati area yang sudah dikhususkan dengan memasang *barrier* beton untuk tempat penyimpanan *grab* masih digunakan untuk parkir truk saat menunggu muatan didalam tongkang/kapal. Tidak ada tindakan peneguran oleh *security* yang berjaga pada Dermaga D kepada supir-supir yang memarkirkan truknya pada area penyimpanan *Grab* . Didapati juga area penyimpanan *Grab* yang tidak dipasang *barrier* beton untuk menghindari tersenggolnya *Grab* pada truk yang melakukan kegiatan bongkar muat di Dermaga. Terlihat seperti pada gambar di bawah :



15. Belum Sterilnya Tempat Penyimpanan Grab

Kriteria

Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/30/12/2/PTP-20 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pedoman Standarisasi Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok.

BAB 3 Standarisasi K3 dan Lingkungan,

3.8 Rambu dan Demarkasi,

3.8.1 Rambu Keselamatan/ Rambu Peringatan.

Perusahaan menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja, kontraktor dan semua pihak yang berada di area Perusahaan dengan pemasangan rambu dan demarkasi.

Tujuan Rambu K3 dan Demarkasi adalah:

- a. Mengingatkan pekerja tentang potensi bahaya dan yang terdapat di area kerja
- b. Memberi petunjuk kondisi keadaan darurat
- c. Membantu pekerja saat proses evakuasi dalam keadaan darurat
- d. Memenuhi persyaratan peraturan keselamatan kerja

Root Cause

- a. Pengelolaan penyimpanan *Grab* belum sepenuhnya berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Perdir K3L yang berlaku;
- b. Belum adanya rambu-rambu peringatan dilarang mendekati disekitar lokasi penyimpanan *Grab*;
- c. Masih terdapat area penyimpanan *Grab* yang tidak dipasang *barrier* beton untuk menghindari tersenggolnya *Grab* pada truk yang ada di Dermaga.

Implikasi Terhadap Bisnis

- a. Berpotensi terjadinya kecelakaan kerja karena tidak adanya rambu-rambu larangan;
- b. Berpotensi terjadinya permasalahan hukum karena belum terlaksananya standard K3L.

15. Belum Sterilnya Tempat Penyimpanan Grab

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
a. Memasang rambu-rambu peringatan dilarang mendekati di sekitar lokasi penyimpanan <i>Grab</i> ; b. Memasang <i>barrier</i> beton/sejenisnya untuk menandakan area penyimpanan <i>Grab</i> .	<i>Branch Manager</i> Cabang Panjang 30 November 2022	2
Komentar Auditi: Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.		

Lampiran 1: Rincian Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Kondisi

Dari hasil audit rutin di Cabang Panjang, kami temukan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan layanan, kepuasan pelanggan dan pekerja serta peningkatan kinerja Cabang sebagai berikut:

1. *Aktiva Tetap belum Dilakukan Pembebanan Penyusutan*

Berdasarkan Kartu Aset Tetap per 31 Juli 2022 terdapat 2 aktiva tetap yang belum dilakukan penyusutan sebagai berikut .:

URAIAN	TAHUN PEROLEHAN	UMUR EKONOMIS	TAHUN BERAKHIR	HARGA PEROLEHAN
Rampdoor Jalur Pipa POME	19-Jan-21	60	19/01/2026	224.378.505
5 Set Pipa Carbon Steel	18-Dec-20	120	18/12/2030	80.000.000

Pengelolaan Kartu Aset Tetap beserta pembebanan penyusutan dilakukan oleh Kantor Pusat, Cabang bersifat pasif dalam hal ini. Telah dilakukan pula konfirmasi ke Kantor Pusat, bahwa hal tersebut didasarkan dari awal atas hasil audit dari *Earst & Young* selaku Kantor Akuntan Publik (KAP) tidak melakukan penyusutan, dan selanjutnya akan ditanyakan lebih lanjut ke KA

2. *Kurangnya Perawatan pada Alat Bantu Bongkar Muat*

Berdasarkan kunjungan lapangan di wilayah kerja PT PTP Lini I khususnya di sepanjang dermaga, lapangan penumpukan barang, dan area penumpukan alat bongkar muat non mekanis ditemukan posisi *Grab* yang penyimpanannya tampak kurang rapi dan *Hopper* yang kurang perawatan sebagaimana gambar berikut :



Lampiran 1: Rincian Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

3. *Penempatan Rampdoor di Lapangan belum Dikenakan Kontribusi Penumpukan*

Pada saat pengecekan ke dermaga dan lapangan terdapat *Ramdoor* diantaranya milik :

- a. PT Kekar Insan Sejahtera (KIS)
- b. PT Lautan Kuda Mas
- c. PT Baruna Karya Investama
- d. PT Sagora

Rampdoor milik mitra tersebut apabila selesai kegiatan bongkar muat tidak dikeluarkan dari area pelabuhan/ditempatkan disisi lapangan. Selama ini Cabang Panjang belum mengenakan jasa penumpukan terhadap alat-alat tersebut (BPRP). Berikut letak *rampdoor* yang ada di are lapangan :



4. *SK GM tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang Telah Habis Masa Berlakunya*

Ketua Tim Pengadaan Barang dan Jasa PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Panjang adalah Sdr. Teguh Widodo dengan jabatan DM Operasi yang juga merupakan User dari pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT PTP Cabang Panjang. Surat keputusan General Manager Nomor HK.55/16/04/01/OPS.PJG.PTP-21 Tanggal 16 April 2021 Tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Panjang sudah habis masa berlakunya.

Lampiran 1: Rincian Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

5. Pencatatan Biaya Tahun 2021 yang Dicatat di Tahun 2022

Masih adanya pencatatan biaya tahun 2021 di tahun 2022 sebesar Rp1.713.700.098,00 dikarenakan pencatatan biaya akrual tidak dilakukan di tiap periode berjalan sehingga menyebabkan biaya tahun 2022 tidak sepenuhnya menjadi biaya tahun tersebut dikarenakan adanya pencatatan biaya yang melewati tahun anggaran yang bersangkutan. Hal ini agar menjadi perhatian manajemen PTP Cabang Panjang penyajian laporan keuangan dapat merepresentasikan kondisi keuangan dari PTP Cabang Panjang secara akurat dan *valid*.

NO	TANGGAL POSTING	NO JB	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH BIAYA
1	31-Jan-22	JB 17125	PEMBAYARAN PEKERJAAN 2 PELAKSANA BM OPERASI APRIL-NOV 21 PT KIS	99.570.272,00
2	31-Jul-22	JB 21892	TAGIHAN REVENUE SHARING` OKT-DES 2021 PT IKT	1.141.757.455,00
3	30-Apr-22	JB 19752	KEBERSIHAN DERMAGA MEI 2021 S.D DESEMBER 2021` PT KIS	397.284.837,00
4	30-Apr-22	JB 19752	KEBERSIHAN DERMAGA MEI 2021 S.D DESEMBER 2021`	3.228.500,00
5	31-Jan-22	JB 17193	BAGI HASIL JETI DESEMBER KEGIATAN 2021	71.859.034,00
JUMLAH				1.713.700.098,00

Dalam masa pengujian, auditor kesulitan untuk mencari beban buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) per kegiatan dikarenakan Keuangan PTP Cabang Panjang melakukan pembuatan 1 (satu) PO, TTB dan *Invoice* untuk beberapa kegiatan sesuai dengan tagihan dari *Vendor*.

[illegible]

Lampiran 2: Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Rekomendasi		PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
1.	Melakukan koordinasi ke Kantor Pusat terhadap validitas aktiva tetap berupa <i>Rampdoor</i> Jalur Pipa POME dan 5 Set Pipa Carbon Steel yang belum dilakukan penyusutan.	Branch Manager Cabang Panjang	1
2.	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat jadwal pengecekan alat secara periodik bersama Tim JPPI area Panjang dan diketahui atasan; b. Melakukan penyusunan alat ditempat yang aman dan tidak mengganggu aktifitas kerja B/M; c. Melakukan perawatan/pemberian pelumas (anti karat) terhadap alat yang berpotensi korosif. 		
3.	Mengusulkan/membuat agar dapat dibuatkan BPRP dan ditagihkan sewa penumpukan.		
4.	Merevisi atau memperbaharui SK GM PT PTP Cabang Panjang Nomor HK.55/16/04/01/OPS.PJG.PTP-21 Tanggal 16 April 2021 Tentang Pembentukan Tim Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Panjang.		
5.	Melakukan pencatatan atas biaya-biaya akrual di periode berjalan sesuai dengan nilai kontrak yang berlaku agar tidak membebani anggaran di periode tahun berikutnya.		
6.	Pembuatan <i>Purchase Order</i> (PO) untuk pembayaran Beban Buruh (TKBM) agar dapat dilakukan per kegiatan/kapal untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan.		

Opini Audit	Deskripsi
<i>1 - Adequate</i>	Kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
<i>2 - Some Improvement Needed</i>	Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
<i>3 - Major Improvement Needed</i>	Terdapat banyak kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Kontrol yang ada kemungkinan tidak dapat memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
<i>4 - Inadequate</i>	Kontrol yang ada tidak cukup, sesuai, atau efektif dan tidak memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

Prioritas	Deskripsi
1	Perbaikan perlu dilakukan segera/dalam jangka waktu singkat untuk menghindari terganggunya operasi perusahaan.
2	Perbaikan perlu dilakukan dalam tiga bulan karena berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan.
3	Perbaikan dapat dilakukan dalam enam bulan. Tidak berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan.

SURAT PERINTAH

Nomor : KP.412 / 29 / 8 / 11 / PTP-22

1. Dasar :
 - a. Pelaksanaan program pembenahan kelembagaan secara internal agar dapat memberikan layanan prima, meningkatkan citra perusahaan dan memberi nilai tambah bagi stakeholder;
 - b. Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Divisi SPI Tahun 2022;
 - c. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor KP.412/5/11/2/PTP-21 Tanggal 5 November 2021 Tentang Penunjukan Sebagai Auditor;
 - d. Untuk Kepentingan Dinas.
2. Diperintahkan kepada :
 - a. Edy Setyo Rahardjo (Pengawas)
 - b. Heru Susetyohadi (Ketua Tim)
 - c. Doni Restindia Chandra (Anggota)
 - d. Joko Purwanto (Anggota)
 - e. Agus Widjanarko (Anggota)
 - f. Solihin (Anggota)
 - g. Arie Wibowo (Anggota)
 - h. M Reza Hazairin (Anggota)
3. Isi perintah :
 - a. Agar melaksanakan Audit Rutin pada PT PTP Cabang Panjang Tahun 2022;
 - b. Pelaksanaan kegiatan tersebut selama 8 (delapan) hari kalender dimulai sejak tanggal 7 September s.d 14 September 2022;
 - c. Melaporkan hasil Audit kepada Direktur Utama;
 - d. Agar melaksanakan perintah ini sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
4. Perintah Selesai

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Agustus 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTUR UTAMA


PELINDO
MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
Lokasi :
PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
RINO WISNU PUTRO

Terbacaan Yth.
Branch Manager PTP Panjang

Head Office

Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, Indonesia
Eptnnonpetikemas@ptp.co.id

www.ptp.co.id

